



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KINERJA 2025



***Balai Pelaksana Penyediaan dan
Perumahan dan Kawasan
Permukiman Sulawesi III***





KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, **Laporan Kinerja Tahun 2025 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III** dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Laporan kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III selama Tahun Anggaran 2025, sekaligus sebagai implementasi penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan ini memuat gambaran mengenai capaian kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, serta evaluasi terhadap hasil yang telah dicapai dalam mendukung pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang layak, aman, dan berkelanjutan di wilayah Sulawesi III.

Penyusunan laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam pelaksanaan kinerja pada tahun-tahun mendatang, serta menjadi sarana transparansi dan akuntabilitas kepada para pemangku kepentingan. Selain itu, laporan ini juga diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif mengenai kontribusi Balai dalam mendukung kebijakan dan program strategis pemerintah di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta dalam penyusunan laporan kinerja ini. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi acuan dalam meningkatkan kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III di masa yang akan datang.

Akhir kata, kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, saran dan masukan yang konstruktif sangat diharapkan guna penyempurnaan laporan kinerja di masa mendatang.

Makassar, 2 Januari 2026

Kepala Balai,



BAHHTIAR, ST, SST, MSP

NIP. 19711000 200212 1 003

EXECUTIVE SUMMARY

LAPORAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN SULAWESI III

Laporan Kinerja Tahun 2025 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sulawesi III merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi balai dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di wilayah Sulawesi III. Penyusunan laporan ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menekankan pada pencapaian kinerja, efisiensi penggunaan anggaran, serta peningkatan kualitas layanan publik.

Tujuan BP3KP Sulawesi III adalah meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan melalui penyediaan perumahan dan penataan kawasan permukiman di wilayah kerja Sulawesi III.

Sasaran strategis Tahun 2025 meliputi:

1. Meningkatnya penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
2. Meningkatnya kualitas kawasan permukiman melalui penanganan kawasan kumuh.
3. Meningkatnya efektivitas fasilitasi dan pengendalian teknis pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.
4. Terwujudnya tata kelola organisasi yang akuntabel dan berorientasi pada hasil.

Dalam pelaksanaan tugas Tahun 2025, BP3KP Sulawesi III menghadapi beberapa isu strategis, antara lain:

1. Keterbatasan ketersediaan lahan untuk pembangunan perumahan.

2. Tingginya kebutuhan hunian layak bagi MBR yang belum sepenuhnya terpenuhi.
3. Kapasitas pemerintah daerah yang bervariasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program perumahan dan kawasan permukiman.
4. Koordinasi lintas sektor dan lintas pemerintahan yang perlu terus diperkuat guna menjamin keberlanjutan program.
5. Efisiensi dan ketepatan sasaran anggaran dalam menghadapi dinamika kebijakan nasional dan daerah.

Secara umum, kinerja BP3KP Sulawesi III Tahun 2025 menunjukkan hasil yang baik. Capaian utama antara lain:

1. Penyediaan rumah layak huni bagi MBR melalui program pembangunan dan fasilitasi perumahan.
2. Penanganan kawasan permukiman kumuh terlaksana pada Kabupaten Wajo dan Kota Bau-Bau.
3. Pelaksanaan fasilitasi teknis, supervisi, dan pendampingan kepada pemerintah daerah.
4. Nilai capaian indikator kinerja utama (IKU) balai secara keseluruhan mencapai kategori “Baik”

Capaian tersebut menunjukkan kontribusi nyata balai dalam mendukung target nasional pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di wilayah Sulawesi III.

Pada Tahun Anggaran 2025, BP3KP Sulawesi III memperoleh pagu anggaran sebesar **Rp.3.402.462.000,-**. Hingga akhir tahun, realisasi anggaran mencapai **Rp. 3.047.652.245,-** atau **89,57%** dari pagu yang tersedia.

Realisasi anggaran tersebut digunakan untuk:

- Kegiatan penyediaan dan fasilitasi perumahan.
- Penanganan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman.
- Kegiatan pendukung manajemen, perencanaan, monitoring, dan evaluasi.

Tingkat serapan anggaran yang tinggi mencerminkan perencanaan dan pelaksanaan program yang efektif, efisien, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara keseluruhan, kinerja BP3KP Sulawesi III Tahun 2025 menunjukkan capaian yang positif dan sejalan dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Ke depan, balai akan terus meningkatkan sinergi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya, memperkuat perencanaan berbasis kebutuhan, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan program guna mewujudkan penyediaan perumahan dan kawasan permukiman yang layak dan berkelanjutan.

Secara umum, capaian kinerja BP3KP Sulawesi III pada tahun 2025 menunjukkan hasil yang **baik**, dengan sebagian besar indikator kinerja utama berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. Keberhasilan tersebut didukung oleh sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan terkait. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, antara lain keterbatasan anggaran, kondisi geografis wilayah kerja, serta dinamika kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

Hasil evaluasi kinerja menunjukkan bahwa BP3KP Sulawesi III perlu terus melakukan penguatan perencanaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta optimalisasi koordinasi lintas sektor guna meningkatkan kinerja pada tahun-tahun mendatang. Rekomendasi perbaikan yang dihasilkan dari evaluasi kinerja ini akan menjadi dasar dalam penyusunan rencana kerja dan penetapan target kinerja Tahun 2026.

Executive Summary ini diharapkan dapat memberikan gambaran singkat dan komprehensif mengenai kinerja BP3KP Sulawesi III selama Tahun 2025 serta menjadi bahan pertimbangan bagi pimpinan dan pemangku kepentingan dalam pengambilan kebijakan strategis di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	9
1.1 LATAR BELAKANG	10
1.2 TUGAS DAN FUNGSI.....	3
1.3 STRUKTUR ORGANISASI	15
1.4. Sarana dan Prasana	18
1.5 Sistematika Penyajian	29
BAB II PERENCANAAN KINERJA	31
2.1 Rencana Strategis	31
2.2 Perencanaan Kinerja	33
2.3 Metode Pengukuran Kinerja	52
2.4 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)	58
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	66
3.1 Upaya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	66
3.2 Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja, dan Program Prioritas, Prioritas Nasional.....	67
3.3 Analisis Perbandingan Kinerja	74
3.4 Analisis Realisasi Anggaran.....	89
3.5 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	92
3.6 Analisis Pemanfaatan Informasi dalam Pelaporan Kinerja.....	93
3.7 Faktor Pendukung keberhasilan dan Penyebab Kegagalan.....	95
BAB IV PENUTUP	98
4.1 KESIMPULAN	98
4.2 REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT	99

DAFTAR TABEL

<i>Tabel 1.1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan.....</i>	<i>26</i>
<i>Tabel 1.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan.....</i>	<i>27</i>
<i>Tabel 1.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan.....</i>	<i>29</i>
<i>Tabel 1.4 Rekap Aset Aktif Satker Balai P3kp Sulawesi III TA 2025</i>	<i>34</i>
<i>Tabel 1.5 Rekap Aset Aktif Satker P2KP Satker Provinsi Sulawesi Selatan TA 2025....</i>	<i>36</i>
<i>Tabel 1.6 Rekap Aset Aktif Satker P2KP Satker Provinsi Sulawesi Tenggara TA 2025 .</i>	<i>38</i>
<i>Tabel 2.1 Kategorisasi Nilai Angka AKIP dan Interpretasinya.....</i>	<i>66</i>
<i>Tabel 2.2 Kronologi Perubahan Perjanjian Kinerja BP3KP Sulawesi III Tahun Anggaran 2025</i>	<i>70</i>
<i>Tabel 3.2 Target dan Capaian Kinerja Balai P3KP Sulawesi III Berdasarkan Perjanjian Kinerja 2025</i>	<i>84</i>
<i>Tabel 3.4 Perbandingan Target Kinerja dengan capaian Output masing-masing kegiatan Tahun Anggaran 2025</i>	<i>92</i>
<i>Tabel 3.5 Target dan Capaian Kinerja Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.....</i>	<i>95</i>
<i><u>Tabel 3.6</u> Perbandingan Realisasi Tahun Anggaran 2025 dengan tahun sebelumnya .</i>	<i>99</i>
<i>Tabel 3.5 Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Dan Capaian Kinerja Balai Tahun 2025-2029 Terhadap Target Renstra 2020-2029</i>	<i>103</i>

DAFTAR GAMBAR

<i>Gambar. 1.1 Wilayah Kerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III.....</i>	11
<i>Gambar. 1.2 Struktur Organisasi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III.....</i>	12
<i>Gambar. 1.3 Struktur Organisasi Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan.....</i>	12
<i>Gambar. 1.4 Struktur Organisasi Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara.....</i>	13
<i>Gambar 1.5 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan.....</i>	15
<i>Gambar 1.6 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan.....</i>	17
<i>Gambar 1.7 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan.....</i>	19
<i>Gambar 2.1 PK awal BP3KP Sulawesi III Sekjen Kemen PKP.....</i>	38
<i>Gambar 2.2 PK awal BP3KP Sulawesi III Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman.....</i>	39
<i>Gambar 2.3 PK awal BP3KP Sulawesi III Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan.....</i>	40
<i>Gambar 2.4 PK awal BP3KP Sulawesi III Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan.....</i>	42
<i>Gambar 2.5 PK awal BP3KP Sulawesi III Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.....</i>	43
<i>Gambar 2.6 PK Akhir BP3KP Sulawesi III Sekjen Kemen PKP.....</i>	45
<i>Gambar 2.7 PK Akhir BP3KP Sulawesi III Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman.....</i>	46
<i>Gambar 2.8 PK akhir BP3KP Sulawesi III Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan.....</i>	47
<i>Gambar 2.9 PK Akhir BP3KP Sulawesi III Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan.....</i>	48
<i>Gambar 2.10 PK Akhir Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.....</i>	49

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya, diperlukan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mengintegrasikan dari sistem perencanaan, pemograman, penganggaran serta pelaksanaan program dan kegiatan yang kemudian dituangkan dalam laporan kinerja instansi pemerintah.

Dan sebagai wujud dari pelaksanaan akuntabilitas dan kinerja, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III (Balai P3P Sulawesi III) berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis. Pelaporan kinerja dimaksudkan mengkomunikasikan capaian kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya berdasarkan Rencana Strategis Balai P3P Sulawesi III Tahun 2025-2029. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Pasal 20 menyebutkan laporan kinerja dihasilkan dari suatu SAKIP yang diselenggarakan masing-masing identitas pelaporan/akuntansi. Sesuai ketentuan tersebut penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) memiliki peran strategis karena dapat memberikan informasi antara lain:

1. Keberhasilan/kegagalan pencapaian output/outcome yang tercantum dalam perencanaan kinerja tahun 2025;
2. Hubungan kinerja dan hasil sumber daya; dan
3. Menjelaskan kinerja dan hasil-hasil yang dicapai.

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme, Permen PANRB Nomor 53 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional yang menguatkan intergrasi perencanaan, penganggaran, dan pelaporan yang juga berimplikasi pada implementasi SAKIP.

Penyelenggaraan SAKIP meliputi:

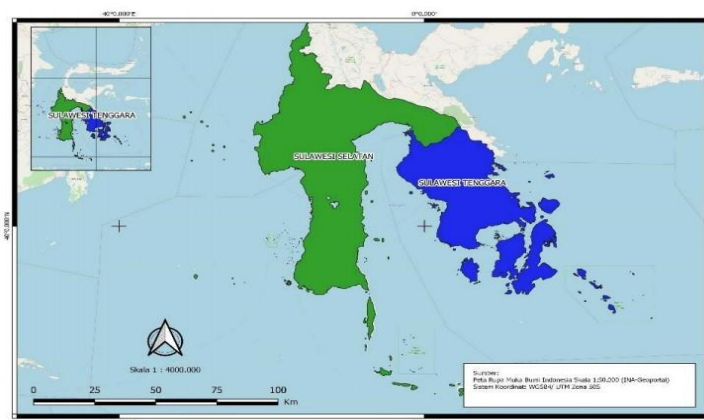
1. Rencana Strategis.
2. Perjanjian Kinerja.

3. Pengukuran Kinerja.
4. Pengelolaan Data Kinerja.
5. Pelaporan Kinerja.
6. Reviu dan Evaluasi Kinerja.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai P2P Sulawesi III Tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indicator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2 TUGAS DAN FUNGSI

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Balai P3KP Sulawesi III merupakan salah satu unit kerja yang menangani Pembangunan Perumahan di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman No 1 Tahun 2025 yang merupakan penggabungan dari Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan dan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara.



Gambar. 1.1 Wilayah Kerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III 1

Berdasarkan Permen PKP Nomor 1 Tahun 2025 Tugas Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III adalah Melaksanakan Penyediaan Perumahan, Peningkatan Kualitas Perumahan, Pengembangan Kawasan Permukiman, penataan Kawasan Permukiman Pasca bencana dan kerusuhan sosial, dan fasilitasi Serah Terima Aset.

Sebelum Tahun 2025 Balai Teknis Perumahan di kenal sebagai Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi III di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pada awalnya unit teknis penyediaan perumahan di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memiliki nomenklatur sebagai Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Sulawesi III yang tersebar di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara. balai ini dibentuk sebagai unit pelaksana teknis (UPT) yang fokus pada pembangunan perumahan dan prasarana perumahan di daerah masing-masing. Sebelum Tahun 2025 struktur organisasi, tugas, dan fungsi awal balai ini mengacu pada Peraturan Menteri PUPR tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT yang juga mengatur penugasan teknis di tingkat daerah.

Pada tahun 2025, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Peraturan ini mengubah nomenklatur dan struktur organisasi UPT, termasuk balai-balai yang sebelumnya disebut BP2P, menjadi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP). Tujuan perubahan ini adalah untuk menyelaraskan fungsi teknis pelaksanaan perumahan dengan fokus yang lebih luas, yaitu tidak hanya penyediaan rumah tetapi juga pengembangan kawasan permukiman serta koordinasi penyediaan lahan, PSU, dan rehabilitasi kawasan pasca bencana.

Sedangkan menurut fungsi Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan program dan anggaran pelaksanaan pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
2. Penyusunan rencana teknis pengembangan Kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
3. pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
4. pelaksanaan dan koordinasi pengawasan dan pengendalian teknis pengembangan Kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
5. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
6. pengelolaan data dan informasi perumahan dan kawasan permukiman;
7. pelaksanaan koordinasi dan dukungan penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusakan sosial;
8. pelaksanaan koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian;
9. pelaksanaan koordinasi pemanfaatan dan penghunian perumahan;
10. pelaksanaan fasilitasi bina usaha dan perlindungan konsumen perumahan;
11. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi forum perumahan dan kawasan permukiman;
12. pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan koordinasi fasilitasi pembiayaan perumahan;
13. pelaksanaan fasilitasi serah terima aset;

14. pelaksanaan dan koordinasi reformasi birokrasi, pembangunan zona integritas, sistem pengendalian intern, sistem manajemen risiko, serta system pengendalian anti korupsi dan penyuaapan; dan
15. pelaksanaan urusan tata usaha, umum dan rumah tangga, komunikasi publik, serta layanan hukum balai.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Secara organisasi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Sulawesi III membawahi 2 (dua) wilayah Satuan Kerja diantaranya Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi Selatan dan Satuan Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi Tenggara. Adapun susunan Struktur Organisasi yaitu :

1.3.1 Susunan Stuktur Organisasi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III

I. Kepala Balai

Kepala Balai mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program kerja. Kepala Balai juga bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan kegiatan dengan bawahan dan memastikan pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku.

II. Kasubag Umum dan Tata Usaha

Melakukan penyusunan program dan anggaran, pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, dan administrasi sumber daya manusia, pengelolaan dan pelaporan administrasi keuangan, pelaksanaan koordinasi reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas, koordinasi administrasi pelaksanaan sistem pengendalian intern dan

penerapan manajemen risiko, komunikasi publik serta layanan hukum balai.

III. Kepala Seksi Pelaksana Wilayah I

- Melakukan penyiapan pelaksanaan dan koordinasi penyusunan rencana teknis pengembangan kawasan permukiman, pembinaan usaha dan perlindungan konsumen, serta koordinasi dan penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusuhan sosial;
- Melakukan koordinasi penyediaan lahan, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas rumah dan prasarana, sarana dan utilitas umum, fasilitasi penghunian, pengawasan dan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, verifikasi data, pada wilayah pesisir sesuai dengan Keputusan Menteri mengenai deliniasi perkotaan, perdesaan dan pesisir.

IV. Kepala Seksi Pelaksana Wilayah II

Melakukan penyiapan pelaksanaan dan koordinasi penyusunan rencana teknis perumahan, koordinasi penyusunan rencana teknis perumahan, koordinasi penyediaan lahan, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas rumah dan prasaranan, sarana dan utilitas umum, fasilitasi penghunian, pengawasan dan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, verifikasi data pada wilayah perkotaan dan perdesaan sesuai dengan Keputusan Menteri mengenai deliniasi perkotaan, perdesaan dan pesisir.

V. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mempunyai tugas melaksanakan tugas dan wewenang terkait pengadaan barang dan jasa serta bertanggung jawab atas segala pengeluaran anggaran belanja.

VI. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM)

Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) mempunyai tugas menguji kebenaran dan kelengkapan dokumen pembayaran. PPSPM juga bertanggung jawab atas keabsahan dokumen tersebut.

VII. Bendahara

mempunyai tugas menerima, menyimpan, membayarkan, menatausakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja.

Adapun Untuk 2 (Dua) Satuan Kerja yang membawahi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III, yaitu Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan dan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara.

1. Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sulawesi Selatan

A. Kepala Satuan Kerja mempunyai tugas menyusun DIPA, menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran/ keuangan , menetapkan rencana melaksanakan kegiatan dan rencana penarikan dana , mengawasi pemantauan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran , menyusun laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan anggaran sesuai dengan perundang – undangan.

B. PPK Perencanaan/ Pengendalian

bertugas menyusun rencana dan analisa teknis, pengendalian pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan rumah susun,

rumah khusus, rumah swadaya, penanganan kawasan permukiman kumuh dan prasarana, sarana, dan utilitas umum di Provinsi Sulawesi Selatan.

C. PPK Rumah Susun dan Rumah Khusus

PPK Rumah Susun dan Rumah Khusus mempunyai tugas melakukan Pelaksanaan kegiatan Rumah Susun dan Rumah Khusus deleniasi perumahan perkotaan di Provinsi Sulawesi Selatan.

D. PPK Rumah Swadaya, PSU, dan Kawasan Permukiman

PPK Rumah Swadaya, PSU dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas melakukan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengembangan Rumah Swadaya, Pembangunan PSU di perumahan MBR, Penanganan kumuh pada kawasan permukiman Provinsi Sulawesi Selatan.

E. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM)

Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) memputugas melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.

F. Bendahara Pengeluaran

Pejabat perbendaharaan negara yang mempunyai tugas melakukan pembayaran atas uang yang ada dalam kewenangannya.

2. Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sulawesi Tenggara

A. Kepala Satuan Kerja mempunyai tugas menyusun DIPA, menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran/ keuangan, menetapkan rencana melaksanakan kegiatan dan rencana penarikan dana, mengawasi pemantauan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan

pelaksanaan kegiatan dan anggaran , menyusun laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan anggaran sesuai dengan perundang – undangan.

B. PPK Perencanaan/ Pengendalian

bertugas menyusun rencana dan analisa teknis, pengendalian pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, penanganan kawasan permukiman kumuh dan prasarana, sarana, dan utilitas umum di Provinsi Sulawesi Tenggara.

G. PPK Rumah Swadaya, PSU, dan Kawasan Permukiman

PPK Rumah Swadaya, PSU dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas melakukan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengembangan Rumah Swadaya, Pembangunan PSU di perumahan MBR, Penanganan kumuh pada kawasan permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara.

H. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM)

Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) memputugas melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.

I. Bendahara Pengeluaran

Pejabat perbendaharaan negara yang mempunyai tugas melakukan pembayaran atas uang yang ada dalam kewenangannya.

Untuk lebih melengkapi Struktur Organisasi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III dan 2 (Dua) Satuan Kerja yaitu Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan dan Satuan Kerja



Gambar 1.4 Struktur Organisasi Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara

1.3.2 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia memegang peran utama dalam menggerakkan dan menentukan keberhasilan organisasi pemerintah untuk mencapai target dan sasaran oleh karena itu organisasi harus didukung oleh sumber daya aparatur yang berkompeten.

Berdasarkan Keseluruhan data kepegawaian Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III yang dibawah oleh 2 Satuan Kerja (SATKER) mengelola SDM sebanyak 142 orang (per 31 Desember 2025) yang terdiri dari 14 Orang Pegawai Negeri Sipil Balai, 18 Orang Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 26 Orang.

Adapun untuk pembagian Satuan Kerja terbagi dari 2 (Dua) yaitu Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan yang mengelola SDM sebanyak 48 orang yang terdiri dari 11 Orang Pegawai Negeri Sipil, 12 Orang Calon Pegawai Negeri Sipil dan 19 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), 6

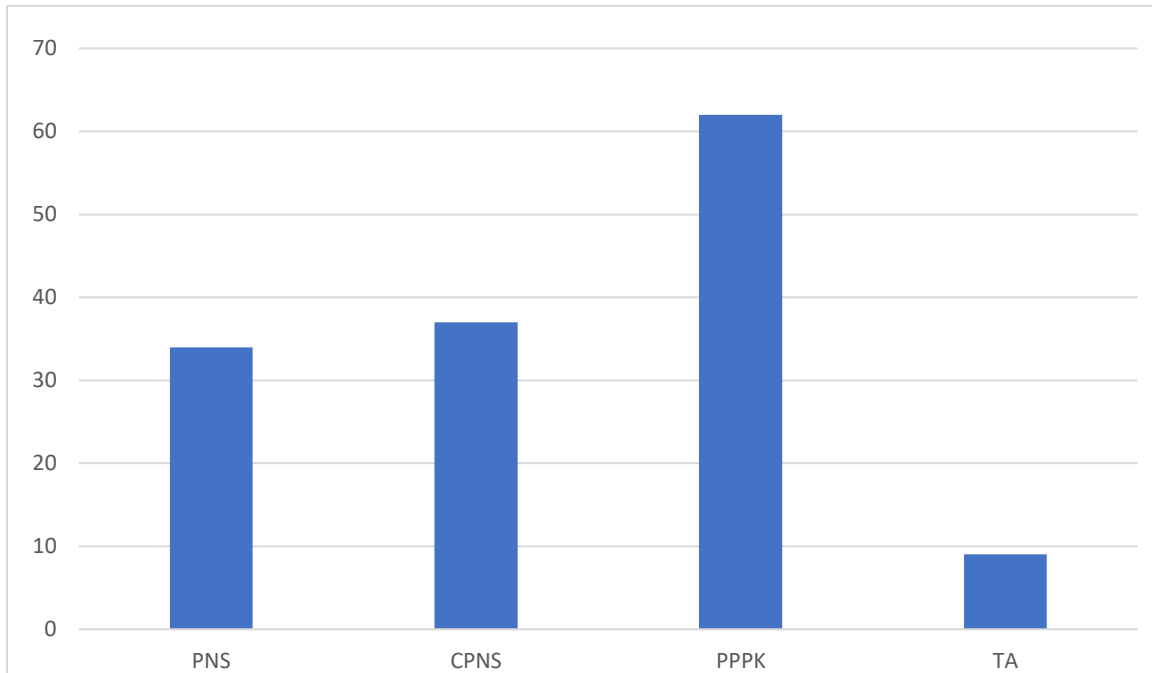
Orang PPNPN / Tenaga Ahli dan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Sulawesi Tenggara mengelola SDM sebanyak 36 orang yang terdiri dari 9 Orang Pegawai Negeri Sipil, 7 Orang Calon Pegawai Negeri Sipil dan 17 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan 3 Orang Tenaga Ahli.

1.3.2.1 Jumlah SDM Berdasarkan Jenis

Pengelolaan SDM bertujuan untuk mewujudkan SDM aparatur yang berAHLAK dalam melaksanakan tugas untuk mencapai Sasaran Strategis Kementrian di Tahun 2025, yang jumlah keseluruhan pegawai Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III sebanyak 142 Orang yang terdiri dari 14 Orang Pegawai Negeri Sipil Balai yang dimana 8 Orang berjenis kelamin laki-laki dan 6 Orang berjenis kelamin perempuan dan 18 Orang Calon Pegawai Negeri Sipil Balai yang dimana 8 Orang berjenis kelamin laki-laki dan 10 Orang berjenis kelamin perempuan dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 26 Orang yang dimana 19 Orang berjenis kelamin laki-laki dan 5 Orang berjenis kelamin perempuan. Sedangkan yang di bawah Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi Selatan sebanyak 48 Orang yang terdiri dari 11 Orang Pegawai Negeri Sipil, 12 Orang Calon Pegawai Negeri Sipil dan 19 Orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta Tenaga Ahli sebanyak 6 Orang yang dimana 3 Orang berjenis kelamin Perempuan dan 3 Orang berjenis kelamin laki – laki Sedangkan untuk Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara mengelola SDM sebanyak 36 orang, 9 Orang Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 17 Orang, serta Calon Pegawai Negeri Sipil sebanyak 7 Orang dan 3 Orang Tenaga Ahli dengan jenis kelamin Laki – Laki sebanyak 3 Orang.

Adapun Penyajian Dalam Bentuk Grafis Sebagai Berikut:

Gambar 1.5 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan



Sumber data: Data Pegawai BP3KP Sulawesi III

Berdasarkan Gambar 1.5 menunjukkan distribusi jumlah pegawai berdasarkan status kepegawaian. PPPK merupakan kategori dengan jumlah tertinggi, yaitu sekitar 62 orang, yang menandakan bahwa tenaga PPPK mendominasi komposisi pegawai. Selanjutnya, CPNS dan PNS memiliki jumlah yang relatif seimbang, masing-masing sekitar 37 orang dan 34 orang. Sementara itu, TA memiliki jumlah paling sedikit, yaitu sekitar 9 orang. Secara keseluruhan, grafik ini menggambarkan bahwa kontribusi terbesar sumber daya manusia berasal dari PPPK, sedangkan tenaga TA masih sangat terbatas dibandingkan kategori lainnya.

1.3.2.2 Jumlah SDM Berdasarkan Golongan dan Kelompok Jabatan

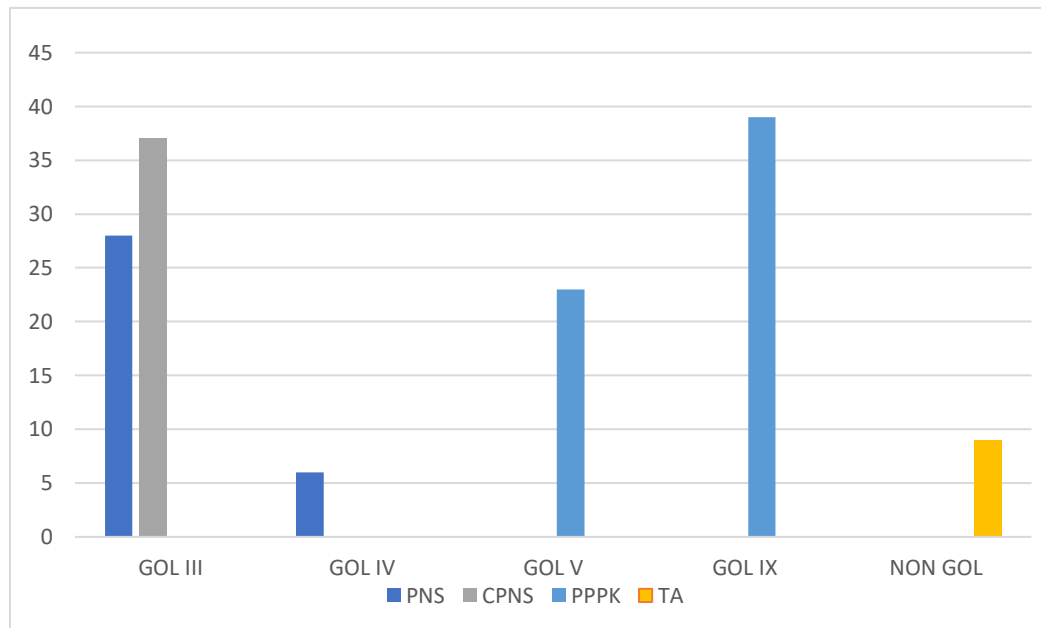
Jumlah SDM berdasarkan Golongan dimana Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III terbagi lagi menjadi dua wilayah yaitu Satuan Kerja Penyediaan



Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi Selatan dan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Jumlah PNS, CPNS, PPPK, dan Tenaga Ahli sebanyak 34 Orang PNS, 37 Orang CPNS, 62 Orang PPPK dan 9 Orang Tenaga Ahli. Khusus Balai yang didominasi pegawai golongan III sebanyak 9 Orang PNS, 18 Orang CPNS dan pegawai golongan IV sebanyak 5 Orang dan golongan IX (PPPK) sebanyak 16 Orang dan 10 Orang golongan V sedangkan Satker Sulsel Sebanyak 11 Orang PNS yang mendominasi pegawai golongan III sebanyak 11 Orang PNS, 12 Orang CPNS, dan PPPK 7 Orang pegawai golongan V dan Golongan IX sebanyak 12 orang dan TA sebanyak 6 orang di satker sulsel dan untuk Satker Sultra sebanyak 9 Orang PNS, CPNS 7 Orang, 17 Orang PPPK dan TA 3 Orang. Di dominasi pegawai golongan III sebanyak 8 Orang PNS dan pegawai golongan IV sebanyak 1 orang, CPNS 7 Orang selanjutnya untuk pegawai golongan IX (PPPK) sebanyak 11 Orang dan golongan V sebanyak 6 Orang Adapun untuk jenjang pendidikan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi III memiliki jenjang pendidikan diploma 3 (D3), sarjana (S1) hingga Magister (S2). saat ini latar belakang pendidikan menjadi modal baik yang harus di miliki para pegawai karena bisa menjamin mutu kinerja untuk infrastruktur PKP dengan prinsip yang efisien dan efektif serta peningkatan mutu kegiatan.

Penyajian bentuk grafis dan tabel:

Gambar 1.6 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan



Sumber data: Data Pegawai BP3KP Sulawesi III

Berdasarkan Gambar 1.6 menunjukkan distribusi pegawai berdasarkan golongan dan status kepegawaian. Pada Golongan III, terdapat pegawai PNS sekitar 28 orang dan CPNS sekitar 37 orang, menjadikannya golongan dengan jumlah pegawai terbanyak dan didominasi oleh CPNS. Golongan IV hanya diisi oleh PNS dengan jumlah sekitar 6 orang. Selanjutnya, Golongan V dan Golongan IX seluruhnya diisi oleh PPPK, masing-masing sekitar 23 orang pada Golongan V dan 39 orang pada Golongan IX, yang menunjukkan dominasi PPPK pada golongan tersebut. Sementara itu, kategori TA tercatat sekitar 9 orang. Secara keseluruhan, grafik ini menggambarkan bahwa pegawai PPPK mendominasi pada golongan tinggi, sedangkan PNS dan CPNS lebih banyak berada pada Golongan III, serta jumlah tenaga TA relatif paling sedikit dibandingkan kategori lainnya.

Tabel 1.1 Komposisi Pegawai Berdasarkan 1

Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
PNS			
III/A	1	1	2
III/B	5	6	11
III/C	3	2	5
III/D	8	2	10
IV/A	2	3	5
IV/B	1		1
CPNS			
III/A	17	20	37
III/B	-	-	-
III/C	-	-	-
III/D	-	-	-
IV/A	-	-	-
IV/B	-	-	-
PPPK			
IX	30	9	39
V	16	7	23
PPNPN			
TENAGA AHLI (TA)	3	6	9
TOTAL	86	56	142

Tabel 1.1 Komposisi Pegawai Berdasarkan 2

Sumber data: Data Pegawai BP3KP Sulawesi III

Berdasarkan tabel 1.1 di atas Jumlah pegawai sebanyak 142 orang, terdiri dari 86 laki-laki dan 56 perempuan. Pegawai didominasi oleh PPPK dan CPNS, dengan CPNS seluruhnya berada pada Golongan III/A, sedangkan PPPK terkonsentrasi pada Golongan V dan IX. PNS

tersebar pada Golongan III dan IV, dengan jumlah terbanyak pada Golongan III. Secara umum, pegawai laki-laki lebih dominan, namun pada CPNS dan Tenaga Ahli (TA) proporsi perempuan lebih besar.

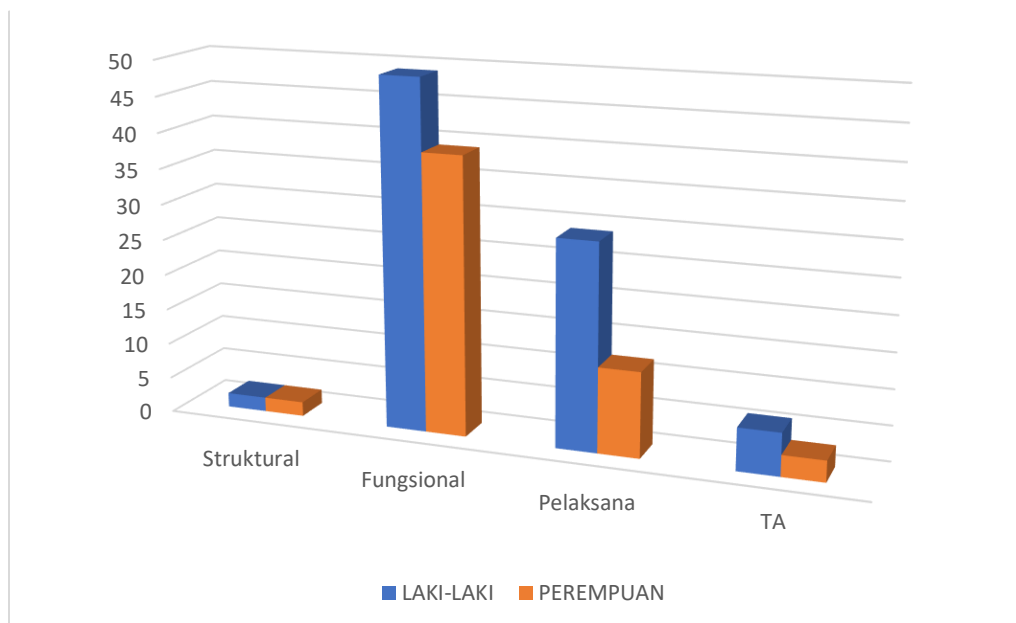
Jabatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Struktural	2	2	4
Fungsional	49	39	88
Pelaksana	29	12	41
Analisis	6	3	9
Total	86	56	142

Tabel 1.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan

Sumber data: Data Pegawai BP3KP Sulawesi III

Berdasarkan table 1.2 Jumlah pegawai sebanyak 142 orang, terdiri dari 86 laki-laki dan 56 perempuan. Pegawai paling banyak menduduki jabatan fungsional sebanyak 88 orang, diikuti jabatan pelaksana sebanyak 41 orang. Jabatan analisis berjumlah 9 orang, sedangkan jabatan struktural paling sedikit dengan 4 orang dan memiliki komposisi gender yang seimbang. Secara umum, jumlah pegawai laki-laki lebih dominan pada seluruh jenis jabatan.

Gambar 1.7 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan



Sumber data: Data Pegawai BP3KP Sulawesi III

Berdasarkan gambar 1.7 diatas menunjukkan distribusi pegawai berdasarkan jabatan dan jenis kelamin. Jabatan fungsional merupakan yang paling dominan, dengan jumlah pegawai laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan. Jabatan pelaksana juga didominasi oleh laki-laki, dengan selisih yang cukup besar dibandingkan perempuan. Pada jabatan struktural, jumlah pegawai laki-laki dan perempuan relatif seimbang. Sementara itu, Tenaga Ahli (TA) memiliki jumlah paling sedikit, dengan proporsi laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Secara keseluruhan, grafik menggambarkan bahwa pegawai laki-laki lebih dominan pada hampir seluruh jabatan.

1.3.2.3 Jumlah SDM Berdasarkan Pendidikan dan Usia

Sumber Daya Manusia di Lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III Tahun 2024 berdasarkan tingkat pendidikan didominasi oleh pegawai dengan tingkat S1 sedangkan berdasarkan usia di dominasi oleh pegawai dengan rentang usia 25 – 45 Tahun. Berikut adalah komposisi SDM berdasarkan Pendidikan dan Usia berdasarkan gender:

Tabel 1.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Tabel

1.3

STATUS PEGAWAI I	JENJANG PENDIDIKAN				
	SMA	D3	S1	S2	TOTAL
PNS	-	1	18	15	34
CPNS	-	-	37	-	37
PPPK	22	-	40	-	62
TA	-	-	9	-	9
TOTAL	22	1	104	15	142

Komposisi Pegawai Berdasarkan 1

Sumber data: Data Pegawai BP3KP Sulawesi III

Jumlah pegawai sebanyak 142 orang, dengan jenjang pendidikan didominasi oleh S1 sebanyak 104 orang, diikuti S2 sebanyak 15 orang. Pegawai berpendidikan SMA berjumlah 22 orang, seluruhnya berasal dari PPPK, sedangkan D3 hanya 1 orang dan berstatus PNS. Berdasarkan status kepegawaian, PNS didominasi oleh pendidikan S1 dan S2, CPNS seluruhnya berpendidikan S1, PPPK mayoritas berpendidikan S1 dan SMA, dan Tenaga Ahli (TA) seluruhnya berpendidikan S1.

1.4. Sarana dan Prasana

Untuk mencapai target kinerja organisasi, ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi secara efektif dan efisien. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi Balai P3P Sulawesi III memiliki sarana dan prasarana fisik dan teknologi informasi yang disampaikan pada Tabel 1.4

Tabel 1.4 Rekap Aset Aktif Satker Balai P3kp Sulawesi III TA 2025

**LAPORAN BARANG PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED**

UAPB : 033 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
UAKPB : 420159 BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN SULAWESI III

Tgl Data : 08/01/26 12:38 AM
Tgl Cetak : 08/01/26 7:58 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_gab_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	BERTAMBAH KUANTITAS	NILAI	BERKURANG KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131111	Tanah		2,000	3,075,000,000	0	0	2,000	3,075,000,000	0	0
2010101001	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	M2	2,000	3,075,000,000	0	0	2,000	3,075,000,000	0	0
132111	Peralatan dan Mesin		400	3,129,150,058	0	0	400	3,129,150,058	0	0
3010109999	Loader Lainnya	dummy	1	16,431,895	0	0	1	16,431,895	0	0
3010110999	Alat Pengangkat Lainnya	dummy	1	14,850,000	0	0	1	14,850,000	0	0
3010303004	Air Compressor	Unit	1	5,280,000	0	0	1	5,280,000	0	0
3020101003	Stasiun Wagon	Unit	2	368,300,000	0	0	2	368,300,000	0	0
3020104001	Sepeda Motor	Unit	1	35,360,000	0	0	1	35,360,000	0	0
3030101005	Mesin Bor	Buah	1	3,960,000	0	0	1	3,960,000	0	0
3030102001	Mesin Gerinda Tangan	Buah	1	3,267,055	0	0	1	3,267,055	0	0
3030102006	Mesin Ampelas Tangan	Buah	1	2,178,220	0	0	1	2,178,220	0	0
3030102008	Mesin Gergaji Besi	Buah	1	4,574,070	0	0	1	4,574,070	0	0
3030104999	Perkakas Bengkel Servise Lainnya (Alat Bengkel Bemesin)	dummy	2	2,835,894	0	0	2	2,835,894	0	0
3030106001	Mesin Gergaji	Buah	1	4,070,600	0	0	1	4,070,600	0	0
3030205003	Tool Cabinet Set	Buah	1	1,320,000	0	0	1	1,320,000	0	0
3030207999	Perkakas Bengkel Kerja Lainnya	dummy	2	4,950,579	0	0	2	4,950,579	0	0
3030212018	Mesin Blower Listrik / Mekanik	Buah	1	462,000	0	0	1	462,000	0	0
3030301032	Digital Multimeter (Alat Ukur Universal)	Buah	2	825,000	0	0	2	825,000	0	0
3030301086	Thermohygrometer (Alat Ukur Universal)	Buah	7	4,426,730	0	0	7	4,426,730	0	0
3040105004	Alat Pengukur Temperatur	Buah	1	3,300,000	0	0	1	3,300,000	0	0
3050104001	Lemari Besi/Metal	Buah	7	28,332,298	0	0	7	28,332,298	0	0
3050104002	Lemari Kayu	Buah	10	31,628,000	0	0	10	31,628,000	0	0
3050104005	Filing Cabinet Besi	Buah	4	7,500,000	0	0	4	7,500,000	0	0
3050104007	Brandkas	Buah	2	9,030,000	0	0	2	9,030,000	0	0
3050105013	Copy Board/Electric White Board	Buah	1	12,010,900	0	0	1	12,010,900	0	0
3050105028	Overhead Projector	Buah	2	26,000,000	0	0	2	26,000,000	0	0
3050105048	LCD Projector/Infocus	Buah	5	40,035,940	0	0	5	40,035,940	0	0
3050105052	Alat Perekam Suara (Voice Pen)	Buah	3	6,609,900	0	0	3	6,609,900	0	0
3050201001	Meja Kerja Besi/Metal	Buah	5	57,475,000	0	0	5	57,475,000	0	0
3050201002	Meja Kerja Kayu	Buah	16	41,205,872	0	0	16	41,205,872	0	0
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	30	30,990,000	0	0	30	30,990,000	0	0
3050201004	Kursi Kayu	Buah	11	11,671,000	0	0	11	11,671,000	0	0
3050201005	Stice	Buah	1	3,070,000	0	0	1	3,070,000	0	0
3050201008	Meja Rapat	Buah	27	75,853,128	0	0	27	75,853,128	0	0
3050201020	Kursi Fiber Glas/Plastik	Buah	59	75,417,000	0	0	59	75,417,000	0	0
3050203003	Mesin Pematong Rumput	Buah	1	965,000	0	0	1	965,000	0	0
3050204004	A.C. Split	Buah	24	130,769,750	0	0	24	130,769,750	0	0

**LAPORAN BARANG PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED**

UAPB : 033 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
UAKPB : 420159 BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN SULAWESI III

Tgl Data : 08/01/26 12:38 AM
Tgl Cetak : 08/01/26 7:58 AM
Halaman : 2
Kode Lap : lap_bmn_gab_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	BERTAMBAH KUANTITAS	NILAI	BERKURANG KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3050205019	Mixer	Buah	2	25,379,000	0	0	2	25,379,000	0	0
3050206002	Televisi	Buah	7	75,695,846	0	0	7	75,695,846	0	0
3050206007	Loudspeaker	Buah	2	6,000,000	0	0	2	6,000,000	0	0
3050206046	Handy Cam	Buah	2	11,460,900	0	0	2	11,460,900	0	0
3050206080	Bracket Standing Peralatan	Buah	2	4,180,000	0	0	2	4,180,000	0	0
3060101036	Microphone/Wireless MIC	Buah	1	1,250,000	0	0	1	1,250,000	0	0
3060101053	HUM/Cable Compensator	Buah	2	2,879,894	0	0	2	2,879,894	0	0
3060101098	Mixer Sound Sistem	unit	1	2,300,000	0	0	1	2,300,000	0	0
3060102042	Rak Peralatan	Buah	1	4,712,400	0	0	1	4,712,400	0	0
3060102128	Camera Digital	Buah	4	31,570,900	0	0	4	31,570,900	0	0
3060102132	Video Conference	Buah	1	20,328,000	0	0	1	20,328,000	0	0
3060102165	Camera Conference	Buah	2	16,016,000	0	0	2	16,016,000	0	0
3060102167	Drone	Buah	2	34,000,000	0	0	2	34,000,000	0	0
3060104006	Mesin Cetak	Buah	2	5,500,000	0	0	2	5,500,000	0	0
3060201004	Telephone Mobile	Buah	1	1,681,696	0	0	1	1,681,696	0	0
3060201010	Facsimile	Buah	1	2,145,000	0	0	1	2,145,000	0	0
3060207005	Finger Printer Time and Attendance Acces Control System	Buah	1	7,337,000	0	0	1	7,337,000	0	0
3080106002	Pulling Power Test	Buah	1	1,768,895	0	0	1	1,768,895	0	0
3080106004	Hot Press	Buah	1	165,000,000	0	0	1	165,000,000	0	0
3080106999	Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi Lainnya	dummy	1	8,973,895	0	0	1	8,973,895	0	0
3080108014	Dispersion Cups	Buah	1	990,000	0	0	1	990,000	0	0
3080110109	Torque Wrench With Socket Head	Buah	1	2,912,895	0	0	1	2,912,895	0	0
3080110174	Diesel Engine	Buah	1	276,755,000	0	0	1	276,755,000	0	0
3080126004	Wood Lathe	Buah	1	16,662,895	0	0	1	16,662,895	0	0
3080130005	Press Machine	Buah	1	8,918,895	0	0	1	8,918,895	0	0
3080133010	Exhaust Fan (Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas)	Buah	4	12,540,000	0	0	4	12,540,000	0	0
3080137029	Alat Pressol Tangan	Buah	1	3,850,000	0	0	1	3,850,000	0	0
3080141005	Alat Pemadam Kebakaran	Buah	3	7,425,000	0	0	3	7,425,000	0	0
3080141101	Generator	Buah	3	46,533,300	0	0	3	46,533,300	0	0
3080141194	Personal Computer	Buah	3	33,375,714	0	0	3	33,375,714	0	0
3080154031	Klem (Laboratorium Kearsipan)	Buah	3	70,950,000	0	0	3	70,950,000	0	0
3080156011	Alat Uji kuat Lentur	Buah	1	69,300,000	0	0	1	69,300,000	0	0
3080157002	Hydraulic Press/AC	Buah	1	20,149,895	0	0	1	20,149,895	0	0
3080304006	Camera Scopes	Buah	3	44,880,000	0	0	3	44,880,000	0	0
3080308003	Linear Accelerator	Buah	1	7,700,000	0	0	1	7,700,000	0	0
3080706005	Weighing Scale	Buah	1	2,338,632	0	0	1	2,338,632	0	0
3080707005	Circular Saw	Buah	2	3,231,894	0	0	2	3,231,894	0	0

**LAPORAN BARANG PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED**

UAPB : 033 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
UAKPB : 420159 BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN SULAWESI III

Tgl Data : 08/01/26 12:38 AM
Tgl Cetak : 08/01/26 7:58 AM
Halaman : 3
Kode Lap : lap_bmn_gab_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	BERTAMBAH		BERKURANG		KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3080707005	Thicknessing Planer	Buah	1	29,664,895	0	0	1	29,664,895	0	0
3080707007	High Precision Surface Planer Aang Jointer	Buah	2	1,867,894	0	0	2	1,867,894	0	0
3080707999	Pemesinan : Model Ship Workshop Lainnya	dummy	1	41,129,100	0	0	1	41,129,100	0	0
3080709013	Tool Grinding For Woodworking Khives	Buah	1	342,918	0	0	1	342,918	0	0
3080714007	Wireless Data Transmission System	Buah	1	912,000	0	0	1	912,000	0	0
3080808005	Frequence Meter Range	Buah	3	32,844,900	0	0	3	32,844,900	0	0
3100101001	Mainframe (Komputer Jaringan)	Buah	1	19,514,000	0	0	1	19,514,000	0	0
3100102001	P.C Unit	Buah	22	200,336,340	0	0	22	200,336,340	0	0
3100102002	Lap Top	Buah	19	344,625,018	0	0	19	344,625,018	0	0
3100102003	Note Book	Buah	11	169,537,705	0	0	11	169,537,705	0	0
3100102009	Tablet PC	Buah	2	32,980,000	0	0	2	32,980,000	0	0
3100201011	Plotter (Peralatan Mainframe)	Buah	1	39,015,900	0	0	1	39,015,900	0	0
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	28	78,652,115	0	0	28	78,652,115	0	0
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	2	7,500,000	0	0	2	7,500,000	0	0
3170120017	Pallet	Buah	2	8,577,894	0	0	2	8,577,894	0	0
133111	Gedung dan Bangunan		10	5,618,713,000	0	0	10	5,618,713,000	0	0
4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Unit	4	3,752,995,000	0	0	4	3,752,995,000	0	0
4010105001	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	Unit	2	1,176,584,000	0	0	2	1,176,584,000	0	0
4010130001	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Unit	1	33,999,000	0	0	1	33,999,000	0	0
4010204001	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen	Unit	2	570,584,000	0	0	2	570,584,000	0	0
4010212001	Rumah Sederhana Sehat	Unit	1	84,551,000	0	0	1	84,551,000	0	0
134112	Irigasi		1	37,172,000	0	0	1	37,172,000	0	0
5020602006	Bangunan Pengambilan Dari Sumber Air	Unit	1	37,172,000	0	0	1	37,172,000	0	0
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan		266	201,768,532	0	0	266	201,768,532	0	0
3010108011	Concrete Mixer	Unit	1	10,780,000	0	0	1	10,780,000	0	0
3010108012	Concrete Vibrator	Unit	1	5,170,000	0	0	1	5,170,000	0	0
3020101003	Stalon Wagon	Unit	1	36,500,000	0	0	1	36,500,000	0	0
3020201002	Gerobak Dorong	Unit	3	1,567,500	0	0	3	1,567,500	0	0
3030207001	Gergaji	Buah	2	138,000	0	0	2	138,000	0	0
3030207999	Perkakas Bengkel Kerja Lainnya	dummy	41	33,688,775	0	0	41	33,688,775	0	0
3050103008	Mesin Fotocopy Double Folio	Buah	1	24,500,000	0	0	1	24,500,000	0	0
3050105007	CCTV - Camera Control Television System	Buah	8	20,903,200	0	0	8	20,903,200	0	0
3060201001	Telephone (PABX)	Buah	1	5,302,857	0	0	1	5,302,857	0	0
3060201003	Pesawat Telephone	Buah	1	200,000	0	0	1	200,000	0	0
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	1	2,577,200	0	0	1	2,577,200	0	0
6010101001	Monograf	Buah	203	40,998,500	0	0	203	40,998,500	0	0
6010301999	Bahan Kartograf Lainnya	dummy	2	19,442,500	0	0	2	19,442,500	0	0

**LAPORAN BARANG PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED**

UAPB : 033 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
UAKPB : 420159 BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN SULAWESI III

Tgl Data : 08/01/26 12:38 AM

Tgl Cetak : 08/01/26 7:58 AM

Halaman : 4

Kode Lap : lap_bmn_gab_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TOTAL				12,061,803,590		0		12,061,803,590		0

Makassar, 8 Januari 2026
Penanggung Jawab UAKPB
Kuasa Pengguna Barang

Erpika Ansela Surira, ST
198210222006052001

Tabel 1.4 Rekap Aset Aktif Satker Balai 1

Tabel 1.5 Rekap Aset Aktif Satker P2KP Satker Provinsi Sulawesi Selatan TA 2025

No	Jenis>Nama Barang	Jumlah	Keadaan Barang	Total Nilai
Peralatan dan Mesin				
1	Lemari Besi/Metal	4 buah	Baik	14,330,000
2	Lemari Kayu	256 buah	Baik	783,432,154
3	Filing Cabinet Bes	4 buah	Baik	10,480,000
4	Brandkas	1 buah	Baik	5,000,000
5	Locker	2 buah	Baik	10,890,000
6	LCD Projector/Infocus	3 buah	Baik	21,680,000
7	Focusing Screen/Layar LCD Proyektor	1 buah	Baik	1,268,000
8	Meja Kerja Kayu	350 buah	Baik	456,817,698
9	Kursi Besi /Metal	204 buah	Baik	189,522,952
10	Kursi Kayu	332 buah	Baik	298,806,430
11	Meja Rapat	1 buah	Baik	2,085,000
12	Meja Komputer	10 buah	Baik	8,512,300
13	Tempat Tidur Kayu	256 buah	Baik	1,489,024,486

14	Meja Makan Kayu	44 buah	Baik	45,629,980
15	Sofa	44 set	Baik	86,625,000
16	Meja Ruang Tamu	44 buah	Baik	24,750,000
17	Televisi	3 buah	Baik	21,444,400
18	Sound System	1 buah	Baik	6,160,000
19	Camera Digital	2 buah	Baik	23,649,998
20	Camera Conference	1 buah	Baik	6,160,000
21	Drone	1 buah	Baik	20,350,000
22	Telephone	1 buah	Baik	14,531,000
23	Facsimile	1 buah	Baik	1,280,900
24	Perangkat Akses Internet	3 unit	Baik	7,948,000
25	P.C Unit	14 buah	Baik	139,216,000
26	Lap top	28 buah	Baik	396,214,600
27	Printer (Peralatan Personal Komputer)	30 buah	Baik	96,186,102
28	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1 buah	Baik	2,440,000
Gedung dan Bangunan				

1	Flat/Rumah Permanen	Susun	3 unit	Baik	46,966,876,300
---	---------------------	-------	--------	------	----------------

Tabel 1.5 Rekap Aset Aktif Satker P2KP S 1

Tabel 1.6 Rekap Aset Aktif Satker P2KP Satker Provinsi Sulawesi Tenggara TA 2025

No.	Nama Barang/ Merk	Jumlah (Unit/Set)	Tahun Perolehan	Jumlah Nilai Perolehan
1	2	3	4	5
1	Lemari Besi/Metal Merk Importa FE04	6	2018	13.200.000
2	Lemari Besi/Metal File Cabinet 4 Shelf Swing Bei	1	2019	2.357.100
3	Lemari Besi/Metal merk Importa SC 04 BT	1	2020	2.397.250
4	Lemari Besi/Metal merk LCM Porta	3	2021	7.920.000
5	Lemari Besi/Metal merk LCM Porta	1	2022	3.200.000
6	BRANKAS merk Itoki 45	1	2016	4.362.955
7	CCTV merk Dahua	1	2022	9.850.000
8	LCD Projector/Infocus merk Acer	1	2022	4.550.000
9	Meja Kerja Kayu/Meja Kantor Setengah Biro merk Orbitrend	5	2018	5.750.000
10	Meja Kerja Kayu merk Masterindo	3	2021	4.785.000
11	Meja Kerja Kayu	1	2022	6.800.000
12	Kursi Besi/Metal merk Indachi	3	2021	4.785.000



No.	Nama Barang/ Merk	Jumlah (Unit/ Set)	Tahun Perolehan	Jumlah Nilai Perolehan
1	2	3	4	5
13	Sofa merk Procella Keisya321	1	2016	8.007.955
14	Meja Tamu merk Saintano CT.004	1	2016	1.656.818
15	Loudspeaker Noise 899	1	2022	2.350.000
16	Camera Merk Canon SX 710 SN: 0928	1	2021	14.850.000
17	Drone	1	2021	24.750.000
18	Finger Print merk Solution X 302-S	1	2018	2.700.000
19	Lap Top merk Mackbook 13"	1	2019	18.000.000
20	Lap Top merk Asus/Lenovo	4	2021	32.120.000
21	Lap Top merk Asus	1	2022	72.500.000
22	Lap Top merk Asus	3	2022	24.309.000
23	Lap Top merk Asus	2	2022	16.206.000
24	Printer (Peralatan Personal Komputer) merk Epson	1	2021	2.970.000
25	Printer (Peralatan Personal Komputer) merk Epson L1300	7	2022	19.813.500
26	Printer (Peralatan Personal Komputer) A3 merk Epson	1	2022	4.134.750
27	Printer (Peralatan Personal Komputer) merk Epson	1	2018	2.550.000
28	Printer (Peralatan Personal Komputer) merk Epson	1	2019	1.530.000



No.	Nama Barang/ Merk	Jumlah (Unit/ Set)	Tahun Perolehan	Jumlah Nilai Perolehan
1	2	3	4	5
29	Scanner (Peralatan Personal Komputer) merk Canoscan/Scansnap	1	2021	7.810.000
30	Scanner (Peralatan Personal Komputer) merk Epson	5	2022	13.320.000
31	Kursi Besi/Metal merk Frontline Warna Merah	10	2018	3.250.000
32	Serial Scanner/Printer merk Epson DS-410	1	2022	6.500.000
33	Alat Penghancur Kertas merk Krisbow Paper Shredder S215	2	2025	899.800
34	Meja Kerja Kayu merk Active/Vino MTB 120	10	2025	9.000.000
35	Meja Kerja Kayu merk Manford X Table SQR 10378712	1	2025	948.000
36	Kursi Besi/Metal merk Maury Chair Brown 10275775	2	2025	1.898.000
37	Kursi Fiber Glas/Plastik Merk Alden Office Chair Light Grey 10567069	9	2025	7.821.000
Total		97		369.852.128

Tabel 1.6 Rekap Aset Aktif Satker P2KP S 1

1.4 isu Strategis

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, jika tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Identifikasi isu strategis akan meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, mempermudah operasionalisasi program dan kegiatan, serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis. Isu strategis (*strategic issued*) adalah informasi atas kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan dan/atau perumusan pembangunan, karena dampaknya yang signifikan bagi pembangunan dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan pusat khususnya dimasa yang akan datang.

Beberapa permasalahan / Isu strategis berkaitan dengan penyelenggaraan perumahan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III mencakup:

1. Penanganan *Backlog* Perumahan

Salah satu tantangan terbesar adalah kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan rumah yang layak huni. Strategi kementerian meliputi:

- Program Tiga Juta Rumah: Ini merupakan program unggulan untuk menyediakan hunian yang terjangkau dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat, dengan fokus khusus pada MBR.

- Percepatan Regulasi: Mendorong percepatan regulasi untuk mempermudah pembangunan perumahan dan menarik investasi swasta di sektor ini.
 - Penyediaan Lahan: Menyiapkan lahan strategis, sering kali bekerja sama dengan BUMN seperti Perumnas, untuk pembangunan hunian skala besar, termasuk di area perkotaan dan yang terintegrasi dengan transportasi publik (TOD).
2. Peningkatan Akses Hunian Layak dan Terjangkau Kementerian berupaya memastikan MBR dan korban bencana dapat mengakses hunian yang layak:
- Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP): Mempertahankan suku bunga KPR FLPP yang terjangkau (tetap 5%) untuk membantu masyarakat memiliki rumah subsidi.
 - Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS): Program prioritas ini diarahkan untuk perbaikan rumah tidak layak huni yang masih banyak tersebar di Indonesia.
 - Pembangunan Hunian Tetap Korban Bencana: Fokus pada penyediaan perumahan bagi masyarakat yang terdampak bencana alam.
3. Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh
- Target pemerintah adalah mewujudkan "nol persen permukiman kumuh" melalui:
- Program Kota Tanpa Kumuh: Upaya strategis untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh melalui perbaikan infrastruktur dasar (jalan, drainase, sanitasi, air minum) dan peningkatan partisipasi masyarakat.
 - Dorongan Hunian Vertikal: Mendorong pembangunan hunian vertikal sebagai salah satu solusi untuk mengatasi permukiman kumuh di perkotaan yang padat penduduk.

- Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU): Memastikan ketersediaan infrastruktur dasar yang memadai di setiap kawasan permukiman.

4. Peningkatan Tata Kelola dan Kualitas SDM

Isu strategis internal juga mencakup peningkatan koordinasi lintas sektor, standarisasi, dan penerapan manajemen risiko untuk memastikan program berjalan efektif dan efisien.

Isu-isu ini bersifat dinamis dan menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, yang bertujuan menciptakan infrastruktur yang inklusif, ramah lingkungan, dan memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat Indonesia.

1.5 Sistematika Penyajian

Tujuan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman selama Tahun Anggaran 2025. Pada laporan ini, capaian kinerja Balai Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III selama Tahun 2025 diukur dan dievaluasi dengan mengacu pada penetapan kinerja yang telah ditetapkan. Kemudian berdasarkan hasil evaluasi tersebut dirumuskan beberapa rekomendasi untuk peningkatan kinerja ditahun berikutnya. Sistematika penulisan Laporan Kinerja Tahun 2025 dibuat agar mempermudah berbagai pihak untuk mengakses informasi di dalam laporan ini.

Adapun sistematika penyajian Laporan Kinerja adalah sebagai berikut ini :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara umum organisasi dan permasalahan utama (strategic issued) pada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bagian bab ini memberikan penjelasan mengenai garis besar dokumen perencanaan Renstra pada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menjadi acuan dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III Tahun 2025, yang meliputi Rencana Strategis 2025-2029, Indikator Kinerja dan Penetapan Kinerja Tahun 2025.

BAB III KAPASITAS ORGANISASI

Menjelaskan tentang SDM yang ada pada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III beserta dukungan manajemen sarana dan prasarananya melalui anggaran yang sudah ditetapkan

BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA

Menjelaskan analisis pencapaian kinerja yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2025 di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2025.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan perencanaan jangka menengah (lima tahunan) yang disusun sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam penyelenggaraan pembangunan sektor perumahan dan kawasan permukiman secara terpadu, terarah, dan berkelanjutan.

2.1.1 Visi Kementerian Perumahan Dan Kawasan Permukiman.

“Terwujudnya penyediaan perumahan dan kawasan permukiman yang layak, terjangkau, aman, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.”

2.1.2 Misi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menetapkan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
2. Mengurangi backlog perumahan dan rumah tidak layak huni melalui pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan.
3. Meningkatkan kualitas kawasan permukiman, termasuk penanganan dan pencegahan kawasan permukiman kumuh.
4. Mendorong penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan berketahanan terhadap bencana.
5. Memperkuat tata kelola, kelembagaan, dan sinergi lintas sektor dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

6. Meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan perumahan dan pengembangan kawasan permukiman.

2.1.3 Tujuan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

Untuk melaksanakan misi tersebut, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menetapkan tujuan sebagai berikut:

1. Terpenuhinya kebutuhan hunian layak bagi masyarakat, terutama MBR, secara adil dan merata.
2. Menurunnya jumlah backlog perumahan dan rumah tidak layak huni secara signifikan dan berkelanjutan.
3. Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman yang sehat, aman, dan nyaman.
4. Terselenggaranya pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang terintegrasi dan berkelanjutan, selaras dengan rencana pembangunan nasional dan daerah.
5. Terwujudnya tata kelola penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

2.1.4 Sasaran Program

Sasaran Program pada kegiatan Balai Pelaksana Penyediaan perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III yang di targetkan pada tahun 2025-2029 yaitu:

1. Terselenggaranya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Mendukung Penyediaan Rumah Layak Huni;
2. Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman;
3. Meningkatnya Luasan Permukiman Kumuh yang di Tangani secara terpadu;



4. Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan perumahan perdesaan;
5. Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni Melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perdesaan;
6. Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan perumahan perkotaan;
7. Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan;
8. Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan;
9. Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel;
10. Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
11. Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman;

2.2 Perencanaan Kinerja

Perjanjian Kinerja (Performance Agreement) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III adalah bentuk perjanjian Rencana Kinerja pada tahun bersangkutan yang akan dicapai antara Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan

dan Kawasan Permukiman Sulawesi III dengan Direktur Jenderal Kawasan Permukiman, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan, Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan, Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, dan Sekretariat Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Target PK mengacu pada Renstra Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi III maupun Renstra Direktorat-Direktorat di bawah Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. PK menjadi acuan kerja seluruh unit kerja di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi III. Dalam melaksanakan Program Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III memiliki Perjanjian Kinerja.

Perjanjian Kinerja (PK) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi III Tahun Anggaran 2025 disusun berdasarkan alokasi anggaran yang terdapat dalam DIPA sebagai bentuk komitmen serta tanggung jawab atas beban kerja yang diberikan oleh Kementerian Pekerjaan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

2.2.1 Perencanaan Kinerja (PK) Awal

Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Awal Tahun 2025 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III dibuat berdasarkan DIPA Sekretariat Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, DIPA Direktur Jenderal Kawasan Permukiman, DIPA Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan, DIPA Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan, dan DIPA Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.

2.2.1.1 Perencanaan Kinerja (PK) Awal Sekretariat Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Awal Tahun 2025 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III pada DIPA Revisi ke 2 Sekretariat Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor: DIPA-146.01.1.691424/2025 Tanggal 14 Juli 2025 yang berasal dari APBN Murni.

Gambar 2.1 PK awal BP3KP Sulawesi III Sekjen Kemen PKP



**KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **BAKHTIAR**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **DIDYK CHOIROEL**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
- Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 1 Agustus 2025

<p>Pihak Kedua</p> <p>DIDYK CHOIROEL NIP. 19710416 199201 1 001</p>	<p>Pihak Pertama</p>  <p>BAKHTIAR NIP. 19711009 200212 1 003</p>
---	---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen	1 Jumlah Layanan Perkantoran	3 Layanan

KEGIATAN

1	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman
a.	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III
b.	Satker Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan
c.	Satker Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara

PAGU APBN

Rp	919,517,000
Rp	675,911,000
Rp	541,158,000
Rp	2,136,586,000

Jakarta, 1 Agustus 2025

**SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

DIDYK CHOIROEL

**KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN SULAWESI III**

BAKHTIAR

Berdasarkan gambar 2.1 di atas Perjanjian Kinerja (PK) Awal Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Sekretariat Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman terdapat total alokasi anggaran sebesar Rp. 2.136.586.000,- (Dua Miliar Seratus Tiga Puluh Enam Juta Lima Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah) yang mendukung program sasaran kegiatan yaitu Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dengan 1 indikator kinerja berupa jumlah layanan perkantoran dengan total target 3 Layanan.

2.2.1.2 Perencanaan Kinerja (PK) Awal Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Awal Tahun 2025 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III pada DIPA Revisi ke 3 Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Nomor: DIPA-146.03.1.691478/2025 Tanggal 15 Agustus 2025 yang berasal dari APBN Murni.

Gambar 2.2 PK awal BP3KP Sulawesi III Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman



**KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN**
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **BAKHTIAR**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **FITRAH NUR**
Jabatan : Direktur Jenderal Kawasan Permukiman
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 18 Agustus 2025

<p>Pihak Kedua</p> <p>FITRAH NUR NIP. 19670419 199403 1 003</p>	<p>Pihak Pertama</p>  <p>BAKHTIAR NIP. 19711009 200212 1 003</p>
---	---



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terselenggaranya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Mendukung Penyediaan Rumah Layak Huni	1 Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja	1 Laporan
		2 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Rekomendasi Kebijakan
2	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman	3 Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	3 Laporan
		4 Jumlah unit Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	3534 Unit
3	Meningkatnya Luasan Permukiman Kumuh yang di Tangani secara terpadu	5 Luas Penanganan Permukiman Kumuh	44,94 Hektar

KEGIATAN

- 1 **Program Perumahan dan Kawasan Permukiman**
a. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III
b. Satker Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan
c. Satker Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara

PAGU APBN

Rp	538,388,000
Rp	69,476,179,000
Rp	32,090,246,000
Rp	102,104,813,000.00

Jakarta, 18 Agustus 2024

DIREKTUR JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III

FITRAH NUR

BAKHTIAR

Berdasarkan gambar 2.2 di atas Perjanjian Kinerja (PK) Awal Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman terdapat total alokasi anggaran sebesar Rp. 102.104.813.000,- (Seratus Dua Miliar Seratus Empat Juta Delapan Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah) yang mendukung 3 sasaran kegiatan yaitu Terselenggaranya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Mendukung Penyediaan Rumah Layak Huni, Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman, dan Meningkatnya Luasan Permukiman Kumuh yang di Tangani secara terpadu. Adapun indikator kinerja terdiri dari 5 indikator berupa:

1. Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja dengan total target 1 Laporan.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan perumahan perkotaan	1 Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan
		2 Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	3 Laporan
2	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan	1 Jumlah Rekomendasi Kebijakan penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan
		2 Jumlah Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI Perumahan Perkotaan	44 Unit
3	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan	1 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan
		2 Jumlah Rumah Swadaya Perkotaan yang ditingkatkan kualitasnya	498 Unit

KEGIATAN

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III
Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan
Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara

PAGU APBN

Rp	1,141,223,000.00
Rp	33,432,707,000.00
Rp	3,336,431,000.00
Rp	37,910,361,000.00

Jakarta, 25 Agustus 2025

DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN

Sri Haryati
NIP. 197107071997032004

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III


Bhkhtiar
NIP. 19710092002121003

Berdasarkan gambar 2.3 di atas Perjanjian Kinerja (PK) Awal Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan terdapat total alokasi anggaran sebesar Rp. 37.910.361.000,- (Tiga Puluh Tujuh Miliar Sembilan Ratus Sepuluh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah) yang mendukung tiga sasaran kegiatan yaitu Meningkatkan Kinerja Keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan perumahan perkotaan, Meningkatkan Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan dan Meningkatkan Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan.

Adapun indikator kinerja terdiri dari 6 indikator berupa:

1. Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan dengan total target 1 Laporan/ Rekomendasi.
2. Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan dengan total target 3 Laporan.

3. Jumlah Rekomendasi Kebijakan penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan dengan total target 1 Laporan/ Rekomendasi.
4. Jumlah Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI Perumahan Perkotaan dengan total 44 unit.
5. Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan dengan total target 1 Laporan/ Rekomendasi.
6. Jumlah Rumah Swadaya Perkotaan yang ditingkatkan kualitasnya dengan total target 498 unit.

2.2.1.4 Perencanaan Kinerja (PK) Awal Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Awal Tahun 2025 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III pada DIPA Revisi ke 1 Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Nomor: DIPA-146.04.1.691532/2025 Tanggal 3 Juli 2025.

Gambar 2.4 PK awal BP3KP Sulawesi III Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan



**KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN**
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **BAKHTIAR**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **IMRAN**
Jabatan : Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

IMRAN
NIP. 19731026 199302 1 001

Jakarta, 21 Agustus 2025

Pihak Pertama



BAKHTIAR
NIP. 19711009 200212 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan perumahan perdesaan	1 Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Kegiatan
		2 Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	2 Laporan
2	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni Melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perdesaan	1 Jumlah Unit Rumah Swadaya Perumahan Perdesaan	186 Unit

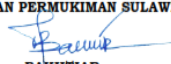
KEGIATAN	PAGU APBN
Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III	Rp 227,394,000.00
Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan	Rp 3,059,047,000.00
Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara	Rp 1,535,245,000.00
	Rp 4,821,686,000.00

Jakarta, 21 Agustus 2025

DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III

IMRAN
NIP. 197310261993021001


BAKHTIAR
NIP. 197110092002121003

Berdasarkan gambar 2.4 di atas Perjanjian Kinerja (PK) Awal Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan terdapat total alokasi anggaran sebesar Rp. 4.821.686.000,- (Tiga Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah) yang mendukung sasaran kegiatan yaitu Meningkatkan Kinerja Keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan perumahan perdesaan, dan Meningkatkan Penyediaan Rumah Layak Huni Melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perdesaan.

Adapun indikator kinerja terdiri dari 3 indikator berupa:

1. Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan dengan total target sebanyak 1 kegiatan.
2. Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan sebanyak 2 laporan.
3. Jumlah Unit Rumah Swadaya Perumahan Perdesaan sebanyak 186 unit.

2.2.1.5 Perencanaan Kinerja (PK) Awal Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Awal Tahun 2025 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III pada DIPA Revisi ke 2 Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Nomor: DIPA-146.04.1.691610/2025 Tanggal 14 Juli 2025.

Gambar 2.5 PK awal BP3KP Sulawesi III Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko 1



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **BAKHTIAR**
 Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III
 Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **AZIS ANDRIANSYAH**
 Jabatan : Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko
 Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
- Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 1 Agustus 2025

Pihak Kedua **Pihak Pertama**

AZIS ANDRIANSYAH **BAKHTIAR**
 NIP. 77050672 NIP. 19711009 200212 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III
DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel	1 Jumlah Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi, dan Akuntabilitas	1 Rekomendasi / Laporan
2	Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	2 Jumlah Kebijakan Manajemen Risiko dan Pencegahan Korupsi	1 Rekomendasi / Laporan

KEGIATAN	PAGU APBN
1 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III	Rp 303,466,000 Rp 303,466,000

Jakarta, 1 Agustus 2025

**DIREKTUR JENDERAL TATA KELOLA DAN
PENGENDALIAN RISIKO**

**KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN SULAWESI III**

AZIS ANDRIANSYAH

BAKHTIAR

Berdasarkan gambar 2.5 di atas Perjanjian Kinerja (PK) Awal Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III, Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko terdapat total alokasi anggaran sebesar Rp. 303.466.000,- (Tiga Ratus Tiga Juta Empat Ratus Enam Puluh Enam Juta Rupiah) yang mendukung sasaran kegiatan berupa Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel, dan Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

Dari sasaran kegiatan tersebut terdiri dari 2 indikator kinerja berupa:

1. Jumlah Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi, dan Akuntabilitas dengan total target 1 Laporan / Rekomendasi.
2. Jumlah Kebijakan Manajemen Risiko dan Pencegahan Korupsi dengan total target 1 Laporan/ Rekomendasi.

2.2.2 Perencanaan Kinerja (PK) Akhir

Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Akhir Tahun 2025 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III dibuat berdasarkan DIPA Sekretariat Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, DIPA Direktur Jenderal Kawasan Permukiman, DIPA Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan, DIPA Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan, dan DIPA Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.

2.2.2.1 Perencanaan Kinerja (PK) Akhir Sekretariat Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Akhir Tahun 2025 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman



Sulawesi III pada DIPA Revisi ke 2 Sekretariat Jenderal
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor:
DIPA-146.01.1.691424/2025 Tanggal 13 November 2025.

Gambar 2.6 PK Akhir BP3KP Sulawesi III Sekjen Kemen PKP



**KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN**
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **BAKHTIAR**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **DIDYK CHOIROEL**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
- Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 13 November 2025

Pihak Kedua

DIDYK CHOIROEL
NIP. 19710416 199201 1 001

Pihak Pertama



BAKHTIAR
NIP. 19711009 200212 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen	1 Jumlah Layanan Perkantoran	3 Layanan

KEGIATAN

- 1 **Program Perumahan dan Kawasan Permukiman**
 - a. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III
 - b. Satker Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan
 - c. Satker Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara

PAGU APBN

Rp	1,078,917,000
Rp	840,551,000
Rp	862,358,000
Rp	2,781,826,000

Jakarta, 13 November 2025

**SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

**KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN SULAWESI III**

DIDYK CHOIROEL


BAKHTIAR

Berdasarkan gambar 2.6 di atas Perjanjian Kinerja (PK) Awal Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Sekretariat Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman terdapat total alokasi anggaran sebesar Rp. 2.136.586.000,- (Dua Miliar Seratus Tiga Puluh Enam Juta Lima Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah) yang mendukung program sasaran kegiatan yaitu Meningkatkan Layanan Dukungan Manajemen dengan 1 indikator kinerja berupa jumlah layanan perkantoran dengan total target 3 Layanan.

2.2.2.2 Perencanaan Kinerja (PK) Akhir Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Akhir Tahun 2025 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III pada DIPA Revisi ke 6 Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Nomor: DIPA-146.03.1.691478/2025 Tanggal 2 Oktober 2025.

Gambar 2.7 PK Akhir BP3KP Sulawesi III Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman



**KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN**
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **BAKHTIAR**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **FITRAH NUR**
Jabatan : Direktur Jenderal Kawasan Permukiman
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

FITRAH NUR
NIP. 19670419 199403 1 003

Jakarta, 11 Oktober 2025

Pihak Pertama



BAKHTIAR
NIP. 1971 009 200212 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terselenggaranya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Mendukung Penyediaan Rumah Layak Huni	1 Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja	1 Laporan
		2 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Rekomendasi Kebijakan
2	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman	3 Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	3 Laporan
		4 Jumlah unit Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	3541 Unit
3	Meningkatnya Luasan Permukiman Kumuh yang di Tangani secara terpadu	5 Luas Penanganan Permukiman Kumuh	44,94 Hektar

KEGIATAN

1. **Program Perumahan dan Kawasan Permukiman**
 - a. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III
 - b. Satker Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan
 - c. Satker Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara

PAGU APBN

Rp	538,388,000
Rp	71,245,148,000
Rp	28,513,159,000
Rp	100,296,695,000.00

Jakarta, 11 Oktober 2024

DIREKTUR JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III

FITRAH NUR


BAKHTIAR

Berdasarkan gambar 2.7 di atas Perjanjian Kinerja (PK) Akhir Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman terdapat total alokasi anggaran sebesar Rp. 100.296.995.000,- (Seratus Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah) yang mendukung 3 sasaran kegiatan yaitu Terselenggaranya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Mendukung Penyediaan Rumah Layak Huni, Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman, dan Meningkatnya Luasan Permukiman Kumuh yang di Tangani secara terpadu.

Adapun indikator kinerja terdiri dari 5 indikator berupa:

1. Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja dengan total target 1 Laporan.
2. Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan total target 1 Laporan/ Rekomendasi.

3. Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh dengan total target 3 Laporan.
4. Jumlah unit Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman dengan total 3.541 unit.
5. Luas Penanganan Permukiman Kumuh dengan total 44,94 ha

2.2.2.3 Perencanaan Kinerja (PK) Akhir Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Akhir Tahun 2025 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III pada DIPA Revisi ke 4 Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Nomor: DIPA-146.05.1.691586/2025 Tanggal 17 Oktober 2025.

Gambar 2.8 PK akhir BP3KP Sulawesi III Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan 1

 <small>KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</small>	
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025	
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:	
Nama	: BAKHTIAR
Jabatan	: Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III
Selanjutnya disebut Pihak Pertama	
Nama	: SRI HARYATI
Jabatan	: Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua	
Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:	
1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.	
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.	
Pihak Kedua	Jakarta, 17 Oktober 2025
SRI HARYATI	Pihak Pertama
NIP. 19710707 199703 2 004	
	BAKHTIAR
	NIP. 19711009 200212 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan perumahan perkotaan	1 Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan
		2 Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	3 Laporan
2	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan	1 Jumlah Rekomendasi Kebijakan penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan
		2 Jumlah Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI Perumahan Perkotaan	44 Unit
3	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan	1 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan
		2 Jumlah Rumah Swadaya Perkotaan yang ditingkatkan kualitasnya	490 Unit

KEGIATAN

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III
Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan
Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara

PAGU APBN

Rp	1,141,223,000.00
Rp	33,261,042,000.00
Rp	3,356,638,000.00
Rp	37,758,903,000.00

Jakarta, 17 Oktober 2025

DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN

**KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III**

Sri Haryati
NIP. 197107071997032004


Bakhtiar
NIP. 197110092002121003

Berdasarkan gambar 2.8 di atas Perjanjian Kinerja (PK) Akhir Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan terdapat total alokasi anggaran sebesar Rp. 37.758.903.000 (Tiga Puluh Tujuh Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tiga Ribu Rupiah) yang mendukung tiga sasaran kegiatan yaitu Meningkatkan Kinerja Keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan perumahan perkotaan, Meningkatkan Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan dan Meningkatkan Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan.

Adapun indikator kinerja terdiri dari 6 indikator berupa:

1. Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan dengan total target 1 Laporan/ Rekomendasi.
2. Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan dengan total target 3 Laporan.

3. Jumlah Rekomendasi Kebijakan penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan dengan total target 1 Laporan/ Rekomendasi.
4. Jumlah Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI Perumahan Perkotaan dengan total 44 unit.
5. Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan dengan total target 1 Laporan/ Rekomendasi.
6. Jumlah Rumah Swadaya Perkotaan yang ditingkatkan kualitasnya dengan total target 490 unit.

2.2.2.4 Perencanaan Kinerja (PK) Akhir Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Akhir Tahun 2025 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III pada DIPA Revisi ke 2 Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Nomor: DIPA-146.04.1.691532/2025 Tanggal 24 Oktober 2025.

Gambar 2.9 PK Akhir BP3KP Sulawesi III Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

 <small>KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN REPUBLIK INDONESIA</small>	
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025	
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:	
Nama	: BAKHTIAR
Jabatan	: Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III
Selanjutnya disebut Pihak Pertama	
Nama	: IMRAN
Jabatan	: Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua	
Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:	
1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.	
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.	
Pihak Kedua	Jakarta, 24 Oktober 2025
IMRAN NIP. 19731026 199302 1 001	Pihak Pertama  BAKHTIAR NIP. 19711009 200212 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan perumahan perdesaan	1 Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Kegiatan
		2 Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Perumahan Perdesaan	2 Laporan
2	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni Melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perdesaan	1 Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	3 Laporan
		2 Jumlah Unit Rumah Swadaya Perumahan Perdesaan	175 Unit

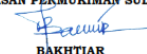
KEGIATAN	PAGU APBN
Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III	Rp 340,468,000.00
Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan	Rp 2,951,123,000.00
Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara	Rp 1,454,271,000.00
	Rp 4,745,862,000.00

Jakarta, 24 Oktober 2025

DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III

IMRAN
NIP. 197310261993021001


BAKHTIAR
NIP. 197110092002121003

Berdasarkan gambar 2.9 di atas Perjanjian Kinerja (PK) Akhir Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan terdapat total alokasi anggaran sebesar Rp. 4.745.862.000,- (Empat Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Juta Delapan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah) yang mendukung sasaran kegiatan yaitu Meningkatkan Kinerja Keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan perumahan perdesaan, dan Meningkatkan Penyediaan Rumah Layak Huni Melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perdesaan.

Adapun indikator kinerja terdiri dari 4 indikator berupa:

1. Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan dengan total target sebanyak 1 kegiatan.
2. Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan sebanyak 2 laporan.
3. Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan sebanyak 3 laporan.

4. Jumlah Unit Rumah Swadaya Perumahan Perdesaan sebanyak 175 unit.

2.2.2.5 Perencanaan Kinerja (PK) Akhir Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Akhir Tahun 2025 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III pada DIPA Revisi ke 2 Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Nomor: DIPA-146.04.1.691610/2025 Tanggal 14 Juli 2025.

Gambar 2.10 PK Akhir Tata Kelola dan Pengendalian Risiko



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **BAKHTIAR**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **AZIS ANDRIANSYAH**
Jabatan : Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
- Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 1 Agustus 2025

Pihak Kedua: **AZIS ANDRIANSYAH**, NIP. 77050672

Pihak Pertama: **BAKHTIAR**, NIP. 19711009 200212 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III
DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel	1. Jumlah Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi, dan Akuntabilitas	1 Rekomendasi / Laporan
2	Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	2. Jumlah Kebijakan Manajemen Risiko dan Pencegahan Korupsi	1 Rekomendasi / Laporan

KEGIATAN

1. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III

PAGU APBN

Rp	303,466,000
Rp	303,466,000

Jakarta, 1 Agustus 2025

DIREKTUR JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
AZIS ANDRIANSYAH

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III
BAKHTIAR

Berdasarkan gambar 2.10 di atas Perjanjian Kinerja (PK) Awal Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III, Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko terdapat total alokasi anggaran sebesar Rp. 303.466.000,- (Tiga Ratus Tiga Juta Empat Ratus Enam Puluh Enam Juta Rupiah) yang mendukung sasaran kegiatan berupa Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel, dan Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

Dari sasaran kegiatan tersebut terdiri dari 2 indikator kinerja berupa:

1. Jumlah Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi, dan Akuntabilitas dengan total target 1 Laporan / Rekomendasi.
2. Jumlah Kebijakan Manajemen Risiko dan Pencegahan Korupsi dengan total target 1 Laporan/ Rekomendasi.

2.3 Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran pencapaian sasaran digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan. Pengukuran yang dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada indikator kinerja yang berupa indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), serta manfaat dan dampak. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan yang menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.



Pengukuran kinerja mencakup kinerja kegiatan dan kinerja sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target baik dalam pencapaian kegiatan maupun pencapaian sasaran dan memperhatikan karakteristik komponen realisasi. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik. Berikut rumus yang digunakan dalam menghitung pencapaian target sebagai berikut:

$$\% \text{ Pencapaian Target} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Berdasarkan pengukuran kinerja kegiatan dalam formular pengukuran kinerja kegiatan dan realisasi pencapaian kegiatan dan sasaran, dilakukan evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja untuk memberikan penjelasan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan dan pencapaian kegiatan dan pencapaian sasaran. Penetapan Indikator ini mengacu pada Sasaran Program Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu “**meningkatnya akses masyarakat terhadap hunian yang layak, aman, dan terjangkau serta terwujudnya kawasan permukiman yang berkelanjutan**”. Indikator Kinerja ditetapkan dengan memfokuskan indikator-indikator kinerja yang dimiliki oleh bagian-bagian yang ada di bawah Balai P3KP Sulawesi III yaitu Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan dan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi Tenggara.

Pengukuran kinerja Balai P2P Sulawesi III mengacu pada Permen PAN-RB Nomor 12 Tahun 2015 yang disajikan dalam Tabel 3.1 berikut ini :

Tabel 2.1 Kategorisasi Nilai Angka AKIP dan Interpretasinya

No	Kategori	Nilai	Interpretasi	Kategori Warna
1	AA	>90-100	Sangat Memuaskan	
2	A	>80-90	Memuaskan , Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel	
3	BB	>70-80	Sangat baik , Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.	
4	B	>60-70	Baik , Akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan	
5	CC	>50-60	Cukup (memadai), Akuntabilitas kerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.	
6	C	>30-50	Kurang , Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.	
7	D	0-30	Sangat Kurang , Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.	

Tabel 2.1 Kategorisasi Nilai Angka AKIP 1

Adapun kronologi perubahan Perjanjian Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III, Satuan kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan, dan Satuan kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2025 dapat digambarkan dalam tabel di bawah ini:

Sasaran Kinerja		Indikator Kinerja	Satuan	Target PK Awal	Target PK Akhir	Target Renstra
Sekretariat Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman						
1.	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen	Jumlah Layanan Perkantoran	Layanan	3 Layanan	3 Layanan	3 Layanan
Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman						
1.	Terselenggaranya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Mendukung Penyediaan Rumah Layak Huni	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	Laporan / Rekomendasi	1 Laporan / Rekomendasi	1 Laporan / Rekomendasi	1 Laporan / Rekomendasi
2.	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pembangunan Rusun,	Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan



		Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh				
		Jumlah unit Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	unit	3.534 unit	3.541 unit	3.541 unit
3.	Meningkatnya Luasan Permukiman Kumuh yang di Tangani secara terpadu	Luas Penanganan Permukiman Kumuh	Hektar	44,94 ha	44,94 ha	44,94 ha
Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan						
1.	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan perumahan perkotaan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Laporan / Rekomendasi	1 Laporan / Rekomendasi	1 Laporan / Rekomendasi	1 Laporan / Rekomendasi
		Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan
2.	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	Laporan / Rekomendasi	1 Laporan / Rekomendasi	1 Laporan / Rekomendasi	1 Laporan / Rekomendasi
		Jumlah Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI Perumahan Perkotaan	unit	44 unit	44 unit	44 unit
3.	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan	Laporan / Rekomendasi	1 Laporan /	1 Laporan /	1 Laporan /



	Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan	Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan		Rekome ndasi	Rekome ndasi	Rekome ndasi
		Jumlah Rumah Swadaya Perkotaan yang ditingkatkan kualitasnya	unit	498 unit	490 unit	490 unit
Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan						
1.	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan perumahan perdesaan	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
		Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Perumahan Perdesaan	Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan
2.	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni Melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perdesaan	Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	Laporan	-	3 Laporan	3 Laporan
		Jumlah Unit Rumah Swadaya Perumahan Perdesaan	unit	186 unit	175 unit	175 unit
Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko						
1.	Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel	Jumlah Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi, dan Akuntabilitas	Rekome ndasi / Laporan	1 Rekomendasi / Laporan	1 Rekomendasi / Laporan	1 Rekomendasi / Laporan

2.	Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	Jumlah Kebijakan Manajemen Risiko dan Pencegahan Korupsi	Rekomen dasi / Laporan	1 Rekomen dasi / Laporan	1 Rekomen dasi / Laporan	1 Rekomen dasi / Laporan
----	---	--	------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Tabel 2.2 Kronologi Perubahan Perjanjia 1

Sumber: Perjanjian Kinerja (PK) BP3KP Sulawesi III Sekretariat Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, Direktorat Perumahan Perkotaan, Direktorat Perumahan Perdesaan, dan Direktorat Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Tahun 2025.

2.4 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. DIPA disusun berdasarkan alokasi anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan menjadi pedoman resmi bagi satuan kerja dalam melaksanakan program dan kegiatan selama tahun anggaran berjalan.

2.4.1 Kronologi Revisi Dipa Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III, Sekjen Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

1. DIPA AWAL tanggal 02 Desember 2024 anggaran Rp. 95.419.000,-
2. Revisi 1 tanggal 11 Juni 2025 anggaran Rp. 919.517.000,- (Revisi DJA)
 - a. Adanya penambahan anggaran di kegiatan Operasional Pemeliharaan Kantor
 - b. Adanya penambahan anggaran di kegiatan Langganan Daya dan Jasa

- c. Adanya penambahan anggaran di kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
 - d. Adanya penambahan anggaran di kegiatan Honor Operasional Satuan Kerja
3. Revisi 2 tanggal 14 Juli 2025 anggaran Rp. 919.517.000,- (Revisi Kanwil)
 - a. Ralat rencana penarikan dana (Halaman III DIPA)
4. Revisi POK tanggal 8 September 2025 anggaran 919.517.000,- (Revisi Satker)
 - a. Adanya pergeseran anggaran dalam hal pagu tetap
 - b. Adanya pergeseran dalam satu keluaran (output)dalam satu kegiatan dan dalam satu satker
5. Revisi 3 tanggal 10 Oktober 2025 anggaran Rp. 919.517.000,- (Revisi Kanwil)
 - a. Ralat rencana penarikan dana (Halaman III DIPA)
6. Revisi 4 tanggal 31 Oktober 2025 anggaran Rp. 977.237.000,- (Revisi DJA)
 - a. Adanya penambahan anggaran untuk kegiatan Operasional Pemeliharaan Kantor (pengadaan baju seragam CPNS)
7. Revisi 5 tanggal 13 November 2025 anggaran Rp. 1,078,917,000,- (Revisi DJA)
 - a. Adanya penambahan anggaran untuk kegiatan Operasional Pemeliharaan Kantor (penambahan honor PISK)
8. Revisi POK tanggal 4 Desember 2025 anggaran 1,078,917,000,- (Revisi Satker)
 - a. Adanya pergeseran anggaran dalam hal pagu tetap
 - b. Adanya pergeseran dalam satu keluaran (output)dalam satu kegiatan dan dalam satu satker
9. Revisi 6 tanggal 8 Desember 2025 anggaran Rp. 1,078,917,000,- (Revisi PemutakhiranKPA)

- a. Adanya pergeseran anggaran dalam hal pagu tetap
 - b. Adanya pergeseran dalam satu keluaran (output)dalam satu kegiatan dan dalam satu satker
10. Revisi 7 tanggal 12 Desember 2025 anggaran Rp. 1,078,917,000,- (Revisi PemutakhiranKPA)
- a. Adanya pergeseran anggaran dalam hal pagu tetap
 - b. Adanya pergeseran dalam satu keluaran (output)dalam satu kegiatan dan dalam satu satker

2.4.2 Kronologi Revisi Dipa Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III, Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman.

1. DIPA AWAL tanggal 02 Desember 2024 anggaran Rp. 50.000.000,-
2. Revisi 1 tanggal 25 Juni 2025 anggaran Rp. 173.248.000,- (Revisi DJA)
 - a. Adanya penambahan anggaran di kegiatan Pemantauan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
3. Revisi 2 tanggal 14 Juli 2025 anggaran Rp. 173.248.000,- (Revisi Kanwil)
 - a. Ralat rencana penarikan dana (Halaman III DIPA)
4. Revisi 3 tanggal 15 Agustus 2025 anggaran Rp. 538.388.000,- (Revisi DJA)
 - a. Adanya penambahan anggaran di kegiatan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh.
5. Revisi 4 tanggal 10 Oktober 2025 anggaran Rp. 538.388.000,- (Revisi Kanwil)
 - a. Ralat rencana penarikan dana (Halaman III DIPA)
 - b. Adanya pergeseran dalam satu keluaran (output)dalam satu kegiatan dan dalam satu satker
6. Revisi POK tanggal 24 Oktober 2025 anggaran Rp. 538.388.000,- (Revisi Satker)

- a. Adanya pergeseran anggaran dalam hal pagu tetap
 - b. Adanya pergeseran dalam satu keluaran (output)dalam satu kegiatan dan dalam satu satker
7. Revisi POK tanggal 12 November 2025 anggaran Rp. 538.388.000,- (Revisi Satker)
- a. Adanya pergeseran anggaran dalam hal pagu tetap
 - b. Adanya pergeseran dalam satu keluaran (output)dalam satu kegiatan dan dalam satu satker
8. Revisi 5 tanggal 8 Desember 2025 anggaran Rp. 538.388.000,- (Revisi Pemutakhiran KPA)
- a. Adanya pergeseran anggaran dalam hal pagu tetap
 - b. Adanya pergeseran dalam satu keluaran (output)dalam satu kegiatan dan dalam satu satker
9. Revisi 6 tanggal 12 Desember 2025 anggaran Rp. 538.388.000,- (Revisi Pemutakhiran KPA)
- a. Adanya pergeseran anggaran dalam hal pagu tetap
 - b. Adanya pergeseran dalam satu keluaran (output)dalam satu kegiatan dan dalam satu satker

2.4.3 Kronologi Revisi Dipa Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan.

1. DIPA AWAL tanggal 02 Desember 2024 anggaran Rp. 100.000.000,-
2. Revisi 1 tanggal 03 Juli 2025 anggaran Rp. 240,212,000,- (Revisi DJA)
 - a. Adanya penambahan anggaran di kegiatan Sinkronisasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan Pusat dan Daerah

- b. Adanya penambahan anggaran di kegiatan Pelaksanaan Pemantauan, Pengendalian Kebijakan dan Pelaporan Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan
3. Revisi 2 tanggal 09 Agustus 2025 anggaran Rp. 1.141.223.000,- (Revisi DJA)
 - a. Adanya penambahan anggaran untuk kegiatan Sinkronisasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan Pusat dan Daerah
 - b. Adanya penambahan anggaran untuk kegiatan Verifikasi Bantuan Pembangunan Perumahan Perkotaan
 - c. Adanya penambahan anggaran untuk kegiatan Verifikasi Bantuan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan
 - d. Adanya penambahan anggaran untuk kegiatan Pelaksanaan Pemantauan, Pengendalian Kebijakan dan Pelaporan Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan
4. Revisi 3 tanggal 10 Oktober 2025 anggaran Rp. 1.141.223.000,- (Revisi Kanwil)
 - a. Ralat rencana penarikan dana (Halaman III DIPA)
5. Revisi 4 tanggal 17 Oktober 2025 anggaran Rp. 1.141.223.000,- (Revisi DJA)
 - a. Adanya pergeseran anggaran untuk kegiatan Sinkronisasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan Pusat dan Daerah
6. Revisi POK tanggal 27 Oktober 2025 anggaran Rp. 1.141.223.000,- (Revisi Satker)
 - a. Adanya pergeseran anggaran dalam hal pagu tetap
 - b. Adanya pergeseran dalam satu akun dalam satu kegiatan dan dalam satu satker
7. Revisi 5 tanggal 8 Desember 2025 anggaran Rp. 1.141.223.000,- (Revisi Pemutakhiran KPA)

- a. Adanya pergeseran anggaran dalam hal pagu tetap
 - b. Adanya pergeseran dalam satu akun dalam satu kegiatan dan dalam satu satker
8. Revisi 6 tanggal 8 Desember 2025 anggaran Rp. 1.141.223.000,- (Revisi Pemutakhiran KPA)
- a. Adanya pergeseran anggaran dalam hal pagu tetap
 - b. Adanya pergeseran dalam satu akun dalam satu kegiatan dan dalam satu satker

2.4.4 Kronologi Revisi Dipa Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III, Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan.

1. DIPA AWAL tanggal 02 Desember 2024 anggaran Rp. 98,072,000,-
2. Revisi 1 tanggal 03 Juli 2025 anggaran Rp. 227,394,000,- (Revisi DJA)
 - a. Adanya penambahan anggaran di kegiatan Sinkronisasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan Pusat dan Daerah
3. Revisi POK tanggal 8 September 2025 anggaran Rp. 227,394,000,- (Revisi Satker)
 - a. Adanya pergeseran anggaran dalam hal pagu tetap
 - b. Adanya pergeseran dalam satu keluaran (output) dalam satu kegiatan dan dalam satu satker
4. Revisi 2 tanggal 24 Oktober 2025 anggaran Rp. 340.468.000,- (Revisi DJA)
 - a. Adanya penambahan anggaran di kegiatan Pemantauan dan Evaluasi BSPPS
5. Revisi POK tanggal 28 November 2025 anggaran Rp. 340.468.000,- (Revisi Satker)
 - a. Adanya pergeseran anggaran dalam hal pagu tetap

- b. Adanya pergeseran dalam satu keluaran (output)dalam satu kegiatan dan dalam satu satker
- 6. Revisi 3 tanggal 8 Desember 2025 anggaran Rp. 340.468.000,- (Revisi Pemutakhiran KPA)
 - a. Adanya pergeseran anggaran dalam hal pagu tetap
 - b. Adanya pergeseran dalam satu keluaran (output)dalam satu kegiatan dan dalam satu satker
- 7. Revisi 4 tanggal 12 Desember 2025 anggaran Rp. 340.468.000,- (Revisi Pemutakhiran KPA)
 - a. Adanya pergeseran anggaran dalam hal pagu tetap
 - b. Adanya pergeseran dalam satu keluaran (output)dalam satu kegiatan dan dalam satu satker

2.4.5 Kronologi Revisi DIPA Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III, Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.

- 1. DIPA AWAL tanggal 02 Desember 2024 anggaran Rp. 45.000.000,-
- 2. Revisi 1 tanggal 24 Juni 2025 anggaran Rp. 303,466,000,- (Revisi DJA)
 - a. Adanya penambahan anggaran di kegiatan Pembangunan Zona Integritas Balai P3KP Sulawesi III
 - b. Adanya penambahan anggaran di kegiatan Penerapan Manajemen Risiko
- 3. Revisi 2 tanggal 14 Juli 2025 anggaran Rp. 303,466,000,- (Revisi Kanwil)
 - a. Ralat rencana penarikan dana (Halaman III DIPA)
- 4. Revisi 3 tanggal 10 Oktober 2025 anggaran Rp. 303,466,000,- (Revisi Kanwil)
 - a. Ralat rencana penarikan dana (Halaman III DIPA)
- 5. Revisi POK tanggal 10 November 2025 anggaran Rp. 303,466,000,- (Revisi Satker)



- a. Adanya pergeseran anggaran dalam hal pagu tetap
 - b. Adanya pergeseran dalam satu keluaran (output)dalam satu kegiatan dan dalam satu satker
6. Revisi 4 tanggal 8 Desember 2025 anggaran Rp. 303,466,000,-
(Revisi Pemutakhiran KPA)
- a. Adanya pergeseran anggaran dalam hal pagu tetap
 - b. Adanya pergeseran dalam satu keluaran (output)dalam satu kegiatan dan dalam satu satker
7. Revisi 5 tanggal 12 Desember 2025 anggaran Rp. 303,466,000,-
(Revisi Pemutakhiran KPA)
- a. Adanya pergeseran anggaran dalam hal pagu tetap
 - b. Adanya pergeseran dalam satu keluaran (output)dalam satu kegiatan dan dalam satu satker

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Upaya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III secara berkelanjutan melakukan berbagai upaya dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi. Upaya tersebut diarahkan untuk memastikan bahwa setiap pelaksanaan program dan kegiatan dilaksanakan secara terukur, transparan, dan selaras dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Salah satu upaya utama yang dilakukan adalah penguatan perencanaan kinerja melalui penyusunan dokumen perencanaan yang berkualitas, meliputi Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, serta Perjanjian Kinerja. Penyusunan dokumen tersebut dilakukan dengan mengacu pada kebijakan nasional dan arah pembangunan sektor perumahan dan kawasan permukiman, serta diselaraskan dengan indikator kinerja utama (IKU) yang terukur dan relevan.

Dalam pelaksanaan kinerja, balai menerapkan sistem monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap capaian kinerja dan realisasi anggaran. Monitoring dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan, serta untuk mengidentifikasi permasalahan yang berpotensi menghambat pencapaian target. Hasil monitoring dan evaluasi tersebut digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dan perbaikan kinerja pada periode berikutnya.

BP3KP Sulawesi III juga melakukan peningkatan akuntabilitas melalui penguatan pelaporan kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dilakukan secara tepat waktu, akurat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelaporan kinerja tidak hanya

menekankan pada tingkat serapan anggaran, tetapi juga pada keterkaitan antara penggunaan anggaran dengan capaian output dan outcome yang dihasilkan.

Upaya peningkatan akuntabilitas kinerja juga didukung melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Balai mendorong peningkatan kompetensi pegawai melalui pembinaan, pelatihan, serta penguatan pemahaman terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dengan meningkatnya kompetensi aparatur, diharapkan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dapat berjalan lebih profesional dan bertanggung jawab.

Balai menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan, termasuk melalui pemanfaatan sistem informasi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Sinergi dan koordinasi dengan unit kerja terkait, baik di tingkat pusat maupun daerah, juga terus ditingkatkan untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program.

Melalui berbagai upaya tersebut, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III berkomitmen untuk terus meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi sebagai wujud pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan dan masyarakat, serta sebagai dasar perbaikan kinerja yang berkelanjutan.

3.2 Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja, dan Program Prioritas, Prioritas Nasional

Capaian kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III pada Tahun Anggaran 2025 diukur berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan antara Kepala Balai dengan atasan langsung. Perjanjian Kinerja tersebut memuat sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang menjadi tolok ukur

keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi balai dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan sektor perumahan dan kawasan permukiman.

Pada Tahun Anggaran 2025, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III memperoleh alokasi anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyediaan perumahan serta pengembangan kawasan permukiman di wilayah kerja Sulawesi III. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah direncanakan dalam dokumen perencanaan kinerja.

Sebagai wujud akuntabilitas dan kinerja, Balai P3KP Sulawesi III berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja selama satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Balai P2P Sulawesi III mendukung program yang melekat pada Unit Organisasi pada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dilaksanakan melalui 2 Satuan kerja dibawahnya yaitu Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan (SulSel) dan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara (SulTra).

3.2.1 Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja

Capaian kinerja output Balai P3P Sulawesi III dilakukan dengan cara menghitung perbandingan antara target dan realisasi pada masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan. Balai P3P Sulawesi III terus melakukan upaya semaksimal mungkin dalam rangka menghasilkan kinerja yang optimal. Proses yang dilalui memang tidak mudah, tetapi pekerjaan berhasil dilakukan secara efektif dan efisien serta akuntabel. Dalam menentukan target, terdapat 2 (dua) faktor yang mempengaruhi target kinerja yaitu berdasarkan Perjanjian Kinerja/DIPA dan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra).

menggunakan tools manajemen proyek (Gantt Chart, milestone) dan melakukan Koordinasi intensif dengan kontraktor untuk mengantisipasi risiko keterlambatan.

Efisiensi pemeliharaan dan operasional Jadwal rutin melalui pemeriksaan fasilitas umum (drainase, jalan lingkungan, lampu jalan) untuk mengurangi kerusakan besar yang memerlukan biaya besar.

Efisiensi Pemanfaatan teknologi informasi melalui Penerapan sistem digital untuk monitoring progres dan keluhan masyarakat, sehingga perbaikan bisa cepat dan tepat sasaran.

Balai juga mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana kerja, termasuk penggunaan teknologi informasi dan sistem aplikasi pendukung dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan kegiatan. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut berkontribusi dalam mempercepat proses kerja, meningkatkan akurasi data, serta mengurangi biaya operasional.

Melalui penerapan efisiensi penggunaan sumber daya tersebut, BP3KP Sulawesi III mampu meningkatkan kinerja organisasi sekaligus menjaga akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan. Ke depan, balai akan terus mendorong penerapan prinsip efisiensi secara berkelanjutan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik.

3.6 Analisis Pemanfaatan Informasi dalam Pelaporan Kinerja

Pemanfaatan informasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III merupakan bagian integral dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Informasi kinerja dimanfaatkan secara menyeluruh mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga

evaluasi kinerja, sehingga laporan yang dihasilkan mencerminkan kondisi kinerja balai secara objektif dan terukur.

Informasi yang digunakan dalam pelaporan kinerja bersumber dari berbagai data pendukung, antara lain data realisasi fisik dan keuangan kegiatan, capaian indikator kinerja, laporan hasil monitoring dan evaluasi, serta hasil koordinasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait. Data tersebut dihimpun dan diolah secara periodik untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai.

Pemanfaatan sistem informasi dan aplikasi pendukung pelaporan kinerja menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas informasi. BP3KP Sulawesi III menggunakan sistem pelaporan dan aplikasi kinerja yang disediakan oleh kementerian untuk mengelola dan menyajikan data kinerja secara terintegrasi. Hal ini mendukung penyajian informasi yang akurat, tepat waktu, dan dapat ditelusuri kembali (traceable), sehingga meningkatkan keandalan laporan kinerja.

Informasi kinerja yang telah dianalisis tidak hanya digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pimpinan dan pemangku kepentingan, tetapi juga dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan manajerial. Hasil analisis tersebut digunakan untuk mengidentifikasi capaian kinerja, kendala pelaksanaan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan program dan kegiatan. Dengan demikian, informasi kinerja berperan penting dalam penyusunan rencana tindak lanjut dan perbaikan kinerja pada periode berikutnya.

Pemanfaatan informasi dalam laporan kinerja juga mendukung peningkatan transparansi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi BP3KP Sulawesi III. Informasi yang disajikan dalam laporan kinerja menjadi bahan evaluasi internal dan eksternal, serta menjadi referensi

dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran yang lebih tepat sasaran dan berbasis kinerja.

Secara keseluruhan, analisis pemanfaatan informasi dalam Laporan Kinerja BP3KP Sulawesi III menunjukkan bahwa informasi kinerja telah dimanfaatkan secara optimal sebagai alat pengendalian, evaluasi, dan peningkatan kinerja organisasi, sejalan dengan prinsip akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik.

3.7 Faktor Pendukung keberhasilan dan Penyebab Kegagalan

Pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III dalam periode pelaporan berjalan dengan baik, meskipun masih menghadapi berbagai tantangan, berikut faktor keberhasilan dan penyebab kegagalan yang dapat diuraikan di bawah ini.

3.7.1 **Faktor Keberhasilan Pelaksanaan Program**

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III dalam periode pelaporan didukung oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Kebijakan dan regulasi yang mendukung Adanya kebijakan nasional serta pedoman teknis dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menjadi landasan yang jelas dalam pelaksanaan program dan kegiatan balai.
2. Dukungan anggaran melalui DIPA Alokasi anggaran yang tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) memberikan kepastian pendanaan bagi pelaksanaan kegiatan penyediaan perumahan dan pengembangan kawasan permukiman.

3. Kompetensi sumber daya manusia Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi teknis dan administratif di bidang perumahan dan kawasan permukiman mendukung pencapaian target kinerja balai.
4. Koordinasi dan sinergi dengan pemerintah daerah Terjalannya koordinasi yang baik dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di wilayah kerja BP3KP Sulawesi III mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan di lapangan.
5. Peran unit pelaksana teknis di daerah BP3KP Sulawesi III sebagai unit pelaksana teknis mampu menjembatani kebijakan pusat dengan kebutuhan daerah sehingga pelaksanaan program dapat lebih tepat sasaran.
6. Dukungan pemangku kepentingan Partisipasi masyarakat dan dukungan pemangku kepentingan lainnya turut menunjang keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan.

3.7.2 Penyebab Kegagalan Pelaksanaan Program

Meskipun sebagian besar target kinerja dapat dicapai, masih terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan, antara lain:

1. Keterbatasan dan keterlambatan realisasi anggaran Keterlambatan pencairan anggaran pada awal atau pertengahan tahun berdampak pada penyesuaian jadwal pelaksanaan kegiatan.
2. Kesiapan pemerintah daerah yang belum merata Perbedaan tingkat kesiapan daerah, khususnya terkait penyediaan lahan, data pendukung, dan komitmen pelaksanaan, mempengaruhi pencapaian target kinerja.
3. Kendala teknis dan kondisi lapangan Kondisi geografis, cuaca, serta aksesibilitas lokasi kegiatan menjadi tantangan dalam pelaksanaan dan pengawasan kegiatan.



4. Keterbatasan sumber daya manusia Jumlah SDM yang terbatas dibandingkan dengan beban kerja berdampak pada intensitas pengendalian dan monitoring kegiatan.
5. Perubahan kebijakan dan penyesuaian program Adanya perubahan kebijakan atau penyesuaian program di tengah tahun anggaran berdampak pada perubahan target dan mekanisme pelaksanaan.
6. Partisipasi masyarakat yang belum optimal Pada beberapa lokasi kegiatan, rendahnya pemahaman dan partisipasi masyarakat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program.

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penyusunan dan evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III secara keseluruhan menunjukkan pencapaian yang baik dan sesuai dengan rencana strategis.

1. **BAB 1 PENDAHULUAN** menjelaskan latar belakang, tugas dan fungsi, struktur organisasi dan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, isu strategis dan sistematika laporan kinerja.
2. **BAB 2 PERENCANAAN KINERJA** memaparkan rencana strategis yang memuat visi, misi tujuan sampai strategi unit organisasi, perjanjian kinerja dan kronologi perubahan perjanjian kinerja, metode pengukuran kinerja berdasarkan renstra, dan mekanisme penganggaran melalui DIPA beserta rincian timeline DIPA.
3. **BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA** menguraikan upaya peningkatan akuntabilitas kinerja, capaian kinerja program dan kegiatan, analisis perbandingan kinerja, analisis realisasi anggaran perbandingan anggaran dan belanja dengan realisasi penggunaan anggaran, efisiensi penggunaan sumber daya memuat uraian kemampuan menggunakan sumber daya secara optimal untuk mencapai keluaran yang maksimal dalam mencapai target kinerja, analisis pemanfaatan informasi dalam pelaporan kinerja, dan faktor pendukung keberhasilan dan penyebab kegagalan.

4. **Bab 4 PENUTUP** memuat Kesimpulan dan rekomendasi dan tindak lanjut uraian upaya-upaya yang akan dilakukan selama tahun anggaran untuk mencapai target tahunan.

Secara keseluruhan, Balai telah memanfaatkan informasi kinerja secara efektif untuk evaluasi, pengambilan keputusan, dan perbaikan program, serta mengoptimalkan sistem monitoring dan pelaporan. Upaya perbaikan ini menunjukkan komitmen Balai dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas layanan kepada masyarakat.

Dengan demikian, LAKIP ini mencerminkan bahwa Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III telah melaksanakan prinsip **akuntabilitas, transparansi, dan kinerja berbasis hasil**, sejalan dengan target strategis nasional dalam penyediaan perumahan dan pengembangan kawasan permukiman yang layak, aman, dan berkelanjutan.

4.2 REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan analisis faktor pendukung serta kendala yang dihadapi selama pelaksanaan program dan kegiatan, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III mengidentifikasi beberapa rekomendasi strategis dan tindak lanjut sebagai upaya peningkatan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas kinerja:

1. Penguatan Perencanaan dan Penganggaran
 - Menyempurnakan mekanisme perencanaan program dan kegiatan agar lebih tepat sasaran.
 - Memastikan kesesuaian antara target program, kebutuhan lapangan, dan alokasi anggaran DIPA.

2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)
 - Mengadakan pelatihan dan pembinaan teknis serta manajerial bagi SDM Balai untuk meningkatkan kompetensi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan.
 - Meningkatkan kapasitas SDM di unit pelaksana teknis (UPT) untuk mendukung implementasi program di tingkat daerah.
3. Optimalisasi Koordinasi dan Sinergi
 - Memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, swasta, dan pemangku kepentingan lain agar program berjalan selaras dengan kebutuhan masyarakat dan kebijakan daerah.
 - Meningkatkan komunikasi dan kolaborasi lintas sektor dalam pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.
4. Pemanfaatan Sistem Informasi Kinerja
 - Mengoptimalkan penggunaan sistem informasi manajemen dan aplikasi pelaporan kinerja untuk mendukung monitoring, evaluasi, dan pengambilan keputusan.
 - Memastikan data yang dikumpulkan akurat, tepat waktu, dan dapat digunakan untuk evaluasi serta perbaikan kinerja program.
5. Peningkatan Partisipasi Masyarakat
 - Mendorong keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap program perumahan dan pengembangan kawasan permukiman, khususnya dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan.
 - Melaksanakan sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat agar program lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.
6. Penguatan Monitoring dan Evaluasi
 - Meningkatkan intensitas pengawasan dan evaluasi terhadap capaian fisik, keuangan, dan indikator kinerja, sehingga kendala

dapat terdeteksi lebih awal dan langkah perbaikan dapat segera dilakukan.

- Menetapkan indikator kinerja yang lebih terukur untuk memudahkan evaluasi hasil dan dampak program.

Dengan diterapkannya rekomendasi dan tindak lanjut tersebut, diharapkan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III dapat meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program, serta memperkuat akuntabilitas dan kinerja berbasis hasil sesuai amanat Rencana Strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dan standar SAKIP.

**LAMPIRAN 1. PK AWAL SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

 KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN REPUBLIK INDONESIA	
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025	
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:	
Nama	: BAKHTIAR
Jabatan	: Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III
Selanjutnya disebut Pihak Pertama	
Nama	: DIDYK CHOIROEL
Jabatan	: Sekretaris Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua	
Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:	
1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.	
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.	
Jakarta, 1 Agustus 2025	
Pihak Kedua	Pihak Pertama
DIDYK CHOIROEL NIP. 19710416 199201 1 001	 BAKHTIAR NIP. 19711009 200212 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025			
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III			
SEKRETARIAT JENDERAL			
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen	1	Jumlah Layanan Perkantoran 3 Layanan
KEGIATAN		PAGU APBN	
1	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman		
	a. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III	Rp	919,517,000
	b. Satker Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan	Rp	675,911,000
	c. Satker Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara	Rp	541,158,000
		Rp	2,136,586,000
SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III	
DIDYK CHOIROEL		Jakarta, 1 Agustus 2025  BAKHTIAR	

**LAMPIRAN 1. PK REVISI SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**



**KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN**
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **BAKHTIAR**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **DIDYK CHOIROEL**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
- Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 13 November 2025

Pihak Kedua

Pihak Pertama

DIDYK CHOIROEL
NIP. 19710416 199201 1 001

BAKHTIAR
NIP. 19711009 200212 1 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen	1 Jumlah Layanan Perkantoran	3 Layanan

KEGIATAN	PAGU APBN
1 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	
a. Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III	Rp 1,078,917,000
b. Satker Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan	Rp 840,551,000
c. Satker Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara	Rp 862,358,000
	Rp 2,781,826,000

Jakarta, 13 November 2025

**SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

DIDYK CHOIROEL

**KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN SULAWESI III**

BAKHTIAR

LAMPIRAN 1. PK AWAL DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **BAKHTIAR**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **FITRAH NUR**
Jabatan : Direktur Jenderal Kawasan Permukiman

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

FITRAH NUR
NIP. 19670419 199403 1 003

Jakarta, 18 Agustus 2025

Pihak Pertama


BAKHTIAR
NIP. 19711009 200212 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terselenggaranya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Mendukung Penyediaan Rumah Layak Huni	1 Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja	1 Laporan
		2 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Rekomendasi Kebijakan
2	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman	3 Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	3 Laporan
		4 Jumlah unit Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	3534 Unit
3	Meningkatnya Luasan Permukiman Kumuh yang di Tangani secara terpadu	5 Luas Penanganan Permukiman Kumuh	44,94 Hektar

KEGIATAN

- 1 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman
 - a. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III
 - b. Satker Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan
 - c. Satker Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara

PAGU APBN

Rp	538,388,000
Rp	69,476,179,000
Rp	32,090,246,000
Rp	102,104,813,000.00

Jakarta, 18 Agustus 2024

DIREKTUR JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

FITRAH NUR

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III


BAKHTIAR

LAMPIRAN 1. PK REV DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN



**KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN**
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **BAKHTIAR**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **FITRAH NUR**
Jabatan : Direktur Jenderal Kawasan Permukiman

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
- Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 11 Oktober 2025

Pihak Kedua

FITRAH NUR
NIP. 19670419 199403 1 003

Jakarta, 11 Oktober 2025

Pihak Pertama



BAKHTIAR
NIP. 19711009 200212 1 003

NO	SABARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terselenggaranya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Mendukung Penyediaan Rumah Layak Huni	1 Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja	1 Laporan
		2 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Rekomendasi Kebijakan
2	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman	3 Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	3 Laporan
		4 Jumlah unit Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	3541 Unit
3	Meningkatnya Luasan Permukiman Kumuh yang di Tangani secara terpadu	5 Luas Penanganan Permukiman Kumuh	44,94 Hektar

KEGIATAN	PAGU APBW
1 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	
a. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III	Rp 538,388,000
b. Satker Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan	Rp 71,245,148,000
c. Satker Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara	Rp 28,513,159,000
	Rp 100,296,695,000.00

DIREKTUR JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

FITRAH NUR

Jakarta, 11 Oktober 2025

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III



BAKHTIAR

LAMPIRAN 1. PK AWAL DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **BAKHTIAR**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **SRI HARYATI**
Jabatan : Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

SRI HARYATI
NIP. 19710707 199703 2 004

Jakarta, 25 Agustus 2025

Pihak Pertama


BAKHTIAR
NIP. 19711009 200212 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan perumahan perkotaan	1 Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan
		2 Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	3 Laporan
2	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan	1 Jumlah Rekomendasi Kebijakan penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan
		2 Jumlah Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI Perumahan Perkotaan	44 Unit
3	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan	1 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan
		2 Jumlah Rumah Swadaya Perkotaan yang ditingkatkan kualitasnya	498 Unit

KEGIATAN

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III
Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan
Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara

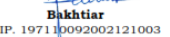
PAGU APBN

Rp	1,141,223,000.00
Rp	33,432,707,000.00
Rp	3,336,431,000.00
Rp	37,910,361,000.00

DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN

Sri Haryati
NIP. 197107071997032004

**KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III**


Bakhtiar
NIP. 197110092002121003

LAMPIRAN 1. PK REV DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN



**KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN**
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **BAKHTIAR**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **SRI HARYATI**
Jabatan : Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
- Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 17 Oktober 2025

Pihak Kedua

Pihak Pertama

SRI HARYATI
NIP. 19710707 199703 2 004

BAKHTIAR
NIP. 1971 009 200212 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan perumahan perkotaan	1 Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan
		2 Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	3 Laporan
2	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan	1 Jumlah Rekomendasi Kebijakan penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan
		2 Jumlah Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI Perumahan Perkotaan	44 Unit
3	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan	1 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan
		2 Jumlah Rumah Swadaya Perkotaan yang ditingkatkan kualitasnya	490 Unit

KEGIATAN	PAGU APBN
Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III	Rp 1,141,223,000.00
Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan	Rp 33,261,042,000.00
Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara	Rp 3,356,638,000.00
	Rp 37,758,903,000.00

DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN

Sri Haryati
NIP. 197107071997032004

Jakarta, 17 Oktober 2025
KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III

Bakhtiar
NIP. 1971 0092002121003

LAMPIRAN 1. PK AWAL DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **BAKHTIAR**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **IMRAN**
Jabatan : Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 21 Agustus 2025

Pihak Kedua

IMRAN
NIP. 19731026 199302 1 001

Pihak Pertama

BAKHTIAR
NIP. 19711009 200212 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan perumahan perdesaan	1 Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Kegiatan
		2 Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	2 Laporan
2	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni Melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perdesaan	1 Jumlah Unit Rumah Swadaya Perumahan Perdesaan	186 Unit

KEGIATAN

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III
Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan
Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara

PAGU APBN

Rp 227,394,000.00
Rp 3,059,047,000.00
Rp 1,535,245,000.00
Rp 4,821,686,000.00

Jakarta, 21 Agustus 2025

DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN

IMRAN
NIP. 197310261993021001

**KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III**

BAKHTIAR
NIP. 197110092002121003

LAMPIRAN 1 PK REV DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN



**KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **BAKHTIAR**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **IMRAN**
Jabatan : Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
- Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

IMRAN
NIP. 19731026 199302 1 001

Jakarta, 24 Oktober 2025

Pihak Pertama



BAKHTIAR
NIP. 19711009 200212 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan perumahan perdesaan	1 Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Kegiatan
		2 Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Perumahan Perdesaan	2 Laporan
2	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni Melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perdesaan	1 Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	3 Laporan
		2 Jumlah Unit Rumah Swadaya Perumahan Perdesaan	175 Unit

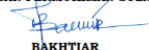
KEGIATAN	PAGU APBN
Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III	Rp 340,468,000.00
Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan	Rp 2,951,123,000.00
Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara	Rp 1,454,271,000.00
	Rp 4,745,862,000.00

Jakarta, 24 Oktober 2025

DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III

IMRAN
NIP. 197310261993021001


BAKHTIAR
NIP. 197110092002121003

LAMPIRAN 1.PK AWAL DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **BAKHTIAR**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **AZIS ANDRIANSYAH**
Jabatan : Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

AZIS ANDRIANSYAH
NIP. 77050672

Jakarta, 1 Agustus 2025

Pihak Pertama


BAKHTIAR
NIP. 19711009 200212 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel	1 Jumlah Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi, dan Akuntabilitas	1 Rekomendasi / Laporan
2	Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	2 Jumlah Kebijakan Manajemen Risiko dan Pencegahan Korupsi	1 Rekomendasi / Laporan

KEGIATAN

- 1 **Program Perumahan dan Kawasan Permukiman**
Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi III

PAGU APBN

Rp 303,466,000
Rp 303,466,000

Jakarta, 1 Agustus 2025

**DIREKTUR JENDERAL TATA KELOLA DAN
PENGENDALIAN RISIKO**

AZIS ANDRIANSYAH

**KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN SULAWESI III**


BAKHTIAR

LAMPIRAN 2 BERITA ACARA KESEPATAN CAPAIAN KINERJA

1. Berita Acara Finalisasi Output



KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT SISTEM DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jalan Raden Patah 1, Nomor 1, Setiabudi, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12110

BERITA ACARA CAPAIAN OUTPUT BANTUAN PSU PERUMAHAN TAPAK DITJEN KAWASAN PERMUKIMAN TA 2025

Rapat : Pembahasan Finalisasi Berita Acara Capaian Output Bantuan PSU TA 2025
Hari/Tanggal : Jumat, 09 Januari 2026
Pimpinan : Direktur Penyiapan Lahan dan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Kawasan Permukiman
Peserta : 1. Para Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman
2. Para Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman
3. Para PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman

Pada hari ini, Jumat tanggal sembilan bulan Januari tahun dua ribu dua puluh enam (09 - 01 - 2026) melalui Video Conference, telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Finalisasi Berita Acara Capaian Output Bantuan PSU TA 2025 dengan hasil kesepakatan sebagai berikut.

1. Capaian Kinerja dari Perjanjian Kinerja Direktorat Penyiapan Lahan dan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Kawasan Permukiman Tahun 2025:

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Pembangunan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman	Unit	2.986	2.986	100%

2. Capaian Kinerja dari Perjanjian Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025:

No	Balai/Satker	Target (unit)	Realisasi (unit)	Capaian Kinerja (%)
1	Balai P3KP Sumatera II	50	50	100%
	Satker PPK Provinsi Sumatera Utara	50	50	100%
2	Balai P3KP Sumatera V	58	58	100%
	Satker PPK Provinsi Sumatera Selatan	58	58	100%
3	Balai P3KP Kalimantan II	426	426	100%
	Satker PPK Provinsi Kalimantan Selatan	426	426	100%
4	Balai P3KP Jawa I	281	281	100%
	Satker PPK Provinsi Banten	281	281	100%
5	Balai P3KP Jawa II	444	444	100%
	Satker PPK Provinsi Jawa Barat	444	444	100%
6	Balai P3KP Jawa IV	192	192	100%
	Satker PPK Provinsi Jawa Timur	192	192	100%
7	Balai P3KP Nusa Tenggara II	115	115	100%
	Satker PPK Provinsi Nusa Tenggara Timur	115	115	100%
8	Balai P3KP Sulawesi I	497	497	100%
	Satker PPK Provinsi Gorontalo	497	497	100%
9	Balai P3KP Sulawesi II	200	200	100%

No	Balai/Satker	Target (unit)	Realisasi (unit)	Capaian Kinerja (%)
	Satker PPK Provinsi Sulawesi Tengah	200	200	100%
10	Balai P3KP Sulawesi III	325	325	100%
	Satker PPK Provinsi Sulawesi Selatan	325	325	100%
11	Balai P3KP Papua I	330	330	100%
	Satker PPK Provinsi Papua	330	330	100%
12	Balai P3KP Papua II	68	68	100%
	Satker PPK Provinsi Papua Barat	68	68	100%

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

DISETUJUI OLEH,

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA II

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA V

Ir. Wahyu Ad. Setiawan, S.T., M.T.
NIP. 198105122010121001

Ir. Yustin Patra Primordia, S.T., M.Si
NIP. 197206261997032003

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN II

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN JAWA I

Dr. Anggoro Purno, S.T., M.Sc.
NIP. 196306052008121001

Elias Wiyata Pingsabean, S.T., M.T.
NIP. 197808282005021002

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN JAWA II

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN JAWA IV

Mochamad Mulya Permata, S.T., M.T.
NIP. 197109201988031003

Muafra Ofan, S.T., M.M.
NIP. 198303192009011001

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN NUSA TENGGARA II

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI I

Hamdan Paga, S.T., M.S.P.
NIP. 1970051022008111001

Ir. H. Hulung, S.T., M.T.
NIP. 196811251989031033

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI II

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI III

Ir. Rocky Walter Lahope, S.T., M.T.
NIP. 197103132002121008


Bakriy, S.T., S.T., M.S.P.
NIP. 197110092002121033

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PAPUA I

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PAPUA II

Mikhael Nicolas Demena, S.T., M.T.
NIP. 198608132003121004

Ir. P. M. Dedyamuda Kiljan, S.T., M.Si
NIP. 197912272006052001

MENGETAHUI,

DIREKTUR PENYIAPAN LAHAN DAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM KAWASAN PERMUKIMAN

Indra Gunawan, S.T., M.H., GRMP
NIP. 198110162009031005

**LAMPIRAN FOTO KEGIATAN BP3KP SULAWESI III
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	FOTO	NAMA KEGIATAN
1.		<p>Rapat Tahunan dan syukuran PPPK di kantor Balai P3KP Sulawesi III pada hari Jum'at, tanggal 03 Januari 2025</p>
2.		<p>Reses Komisi V DPR-RI, di BBWS pompengan je'neberang pada hari Senin, tanggal 06 Januari 2025</p>
3.		<p>Audiensi PJ Gubernur dengan Kepala Balai sekementerian PUPR Sulawesi Selatan pada hari Selasa, 21 Januari 2025</p>

**LAMPIRAN FOTO KEGIATAN BP3KP SULAWESI III
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	FOTO	NAMA KEGIATAN
4.		Koordinasi Pemerintah Kabupaten Jeneponto pada hari Kamis, tanggal 17 April 2025
5.		Kunjungan Anggota Dewan pada hari Rabu, tanggal 23 April 2025
6.		Kunjungan Dinas Pemerintah Kabupaten Muna pada hari Selasa, 25 April 2025

**LAMPIRAN FOTO KEGIATAN BP3KP SULAWESI III
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	FOTO	NAMA KEGIATAN
7.	 <p>BALAI PELAKSANAAN PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI</p>	<p>Koordinasi Kawasan Wirringtappareng Kabupaten Wajo pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2025</p>
8.	 <p>BALAI PELAKSANAAN PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI</p>	<p>Rumah adat wajo pada hari Kamis, tanggal 15 Mei 2025</p>
9.	 <p>BALAI PELAKSANAAN PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI</p>	<p>Survey kawasan kumuh Wirringtappareng Kab. Wajo pada pada hari Kamis, tanggal 15 Mei 2025</p>

**LAMPIRAN FOTO KEGIATAN BP3KP SULAWESI III
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	FOTO	NAMA KEGIATAN
10.	 <p>BALAI PELAKSANAAN PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI</p>	Rapat PPK Perkotaan & rekanan pada hari Senin, tanggal 19 Mei 2025
11.	 <p>BALAI PELAKSANAAN PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI</p>	Koordinasi Pemerintah Kabupaten Jeneponto pada hari Selasa, tanggal 20 Mei 2025
12.	 <p>BALAI PELAKSANAAN PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI</p>	Rapat pelaksanaan Anggaran satuan kerja di Kementrian PKP pada hari Selasa, tanggal 20 Mei 2025

**LAMPIRAN FOTO KEGIATAN BP3KP SULAWESI III
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	FOTO	NAMA KEGIATAN
13.	 <p>BALAI PELAKSANAAN PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI</p>	Kunjungan Kepala dinas Bombana pada hari Rabu, tanggal 21 Mei 2025
14.	 <p>BALAI PELAKSANAAN PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI</p>	Survey Wirringtappareng Kab. Wajo pada hari Rabu, tanggal 21 Mei 2025
15.	 <p>BALAI PELAKSANAAN PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI</p>	Kunjungan Inspektur Jenderal (Irjen) pada hari Rabu, tanggal 28 Mei 2025

**LAMPIRAN FOTO KEGIATAN BP3KP SULAWESI III
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	FOTO	NAMA KEGIATAN
16.		Upacara Hari Kelahiran Pancasila pada hari Senin, tanggal 02 Juni 2025
17.		Arahan Bapak Direktur Jenderal Kawasan Permukiman di kantor Satuan Kerja Sulawesi Tenggara pada hari Senin, tanggal 09 Juni 2025
18.		Kunjungan RUSUN BPK Sultra pada hari Senin, tanggal 09 Juni 2025

**LAMPIRAN FOTO KEGIATAN BP3KP SULAWESI III
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	FOTO	NAMA KEGIATAN
19.		Kunjungan Bapak Direktur Jenderal Kawasan Permukiman pada hari Senin, tanggal 09 Juni 2025
20.		Kunjungan kawasan kumuh Kota Kendari Sulawesi Tenggara pada hari Selasa, tanggal 10 Juni 2025
21.		Acara Kegiatan Perdesaan pada hari Selasa, tanggal 17 Juni 2025

**LAMPIRAN FOTO KEGIATAN BP3KP SULAWESI III
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	FOTO	NAMA KEGIATAN
22.	 <p>BALAI PELAKSANAAN PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI</p>	Kunjungan Komisi V DPR RI Teguh Iswara pada hari Selasa, tanggal 17 Juni 2025
23.	 <p>BALAI PELAKSANAAN PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI</p>	Hari kedua Acara Kegiatan Perdesaan pada hari Rabu, tanggal 18 Juni 2025
24.	 <p>BALAI PELAKSANAAN PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI</p>	Proses sertifikasi pengelolaan RUSUN ASN BBWS pada hari Rabu, tanggal 18 Juni 2025

**LAMPIRAN FOTO KEGIATAN BP3KP SULAWESI III
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	FOTO	NAMA KEGIATAN
25.	 <p><small>BALAI PELAKSANAAN PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI</small></p>	Kunjungan dinas PERKIM Luwu (belopa) pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2025
26.	 <p><small>BALAI PELAKSANAAN PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI</small></p>	Apel pagi pada hari Senin, tanggal 23 Juni 2025
27.	 <p><small>BALAI PELAKSANAAN PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI</small></p>	Kunjungan DISPERKIM Luwu Timur pada hari Selasa, tanggal 24 Juni 2025

**LAMPIRAN FOTO KEGIATAN BP3KP SULAWESI III
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	FOTO	NAMA KEGIATAN
28.	 <p>BALAI PELAKSANAAN PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI</p>	Kunjungan Dinas pkk Kabupaten Barru pada hari Rabu, tanggal 25 Juni 2025
29.	 <p>BALAI PELAKSANAAN PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI</p>	Rapat tindak lanjut temuan BPK RI pada hari Rabu, tanggal 25 Juni 2025
30.	 <p>BALAI PELAKSANAAN PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI</p>	Kunjungan Kepala Dinas PKP Selayar pada hari Senin, tanggal 30 Juni 2025

**LAMPIRAN FOTO KEGIATAN BP3KP SULAWESI III
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	FOTO	NAMA KEGIATAN
31.	 <p>BALAI PELAKSANAAN PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI</p>	Apel Pagi pada hari Senin, tanggal 30 Juni 2025
32.	 <p>BALAI PELAKSANAAN PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI</p>	Rapat Evaluasi BP3KP SULAWESI III pada hari Senin, tanggal 30 Juni 2025
33.	 <p>BALAI PELAKSANAAN PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI</p>	Audiensi BPS sulsel pada hari Selasa, tanggal 01 Juli 2025

**LAMPIRAN FOTO KEGIATAN BP3KP SULAWESI III
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	FOTO	NAMA KEGIATAN
34.	 <p>BALAI PELAKSANAAN PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI</p>	<p>Kunjungan Kepala BP3KP Sulawesi III ke BPS Provinsi Sulawesi Selatan pada hari Selasa, tanggal 01 Juli 2025</p>
35.	 <p>BALAI PELAKSANAAN PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI</p>	<p>Kunjungan BPJS Ketenagakerjaan pada hari Selasa, tanggal 01 Juli 2025</p>
36.	 <p>BALAI PELAKSANAAN PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI</p>	<p>Tanda Tangan alih kelola kawasan permukiman BPBPK ke BP3KP di Sulawesi Tenggara pada hari Jum'at, tanggal 04 Juli 2025</p>

**LAMPIRAN FOTO KEGIATAN BP3KP SULAWESI III
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	FOTO	NAMA KEGIATAN
37.		Kunjungan kerja DPRD Enrekang pada hari Jum'at, tanggal 04 Juli 2025
38.		Kunjungan KOMISI II DPRD KABUPATEN ENREKANG pada hari Jum'at, tanggal 04 Juli 2025
39.		Koordinasi Bappeda Luwu Utara pada hari senin, tanggal 07 Juli 2025

**LAMPIRAN FOTO KEGIATAN BP3KP SULAWESI III
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	FOTO	NAMA KEGIATAN
40.	 <p>BALAI PELAKSANAAN PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI</p>	Kunjungan Bupati Luwu Utara pada hari Jum'at, tanggal 11 Juli 2025
41.	 <p>BALAI PELAKSANAAN PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI</p>	Rapat Audience Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Buton pada hari Senin, tanggal 14 Juli 2025
42.	 <p>BALAI PELAKSANAAN PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI</p>	Pemilihan Bank Penyalur BPS Tahun 2025 pada hari senin, tanggal 15 Juli 2025

**LAMPIRAN FOTO KEGIATAN BP3KP SULAWESI III
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	FOTO	NAMA KEGIATAN
43.	 <p>BALAI PELAKSANAAN PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI</p>	<p>Penandatanganan alih kelola kawasan permukiman dari BPBP ke BP3KP Sulawesi III pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2025</p>
44.	 <p>BALAI PELAKSANAAN PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI</p>	<p>Rumah Naila (bantuan Bapak Presiden Prabowo) - perumahan Grand Sulawesi GOWA pada hari Rabu, tanggal 16 Juli 2025</p>
45.	 <p>BALAI PELAKSANAAN PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI</p>	<p>Rapat Pembahasan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman, Kawasan Kumuh Witingtappareng Kabupaten Wajo pada hari Kamis, tanggal 17 Juli 2025</p>

**LAMPIRAN FOTO KEGIATAN BP3KP SULAWESI III
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	FOTO	NAMA KEGIATAN
46.	 <p>BALAI PELAKSANAAN PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI</p>	<p>Rapat koordinasi percepatan pendataan perumahan perkotaan perdesaan di provinsi Sulawesi Selatan dan Tenggara pada hari Senin, tanggal 21 Juli 2025</p>
47.	 <p>BALAI PELAKSANAAN PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI</p>	<p>Kunjungan Pemda Kabupaten Maros pada hari Kamis, tanggal 24 Juli 2025</p>
48.	 <p>BALAI PELAKSANAAN PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI</p>	<p>Rapat koordinasi teknis Ditjen KP pada hari Selasa, tanggal 27 Mei 2025</p>

**LAMPIRAN FOTO KEGIATAN BP3KP SULAWESI III
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	FOTO	NAMA KEGIATAN
49.		Kunjungan kerja dinas PKP Kabupaten Bone pada hari Senin, tanggal 28 Juli 2025
50.		Kunjungan kerja dinas PKP Kabupaten Jeneponto pada hari Senin, tanggal 28 Juli 2025
51.		Bimtek RLH dan RTH di Wilayah III, pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2025

**LAMPIRAN FOTO KEGIATAN BP3KP SULAWESI III
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	FOTO	NAMA KEGIATAN
52.	 <p>BALAI PELAKSANAAN PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI</p>	Kunjungan kerja dinas PKP Kabupaten Wajo pada hari Selasa, tanggal 29 Juli 2025
53.	 <p>BALAI PELAKSANAAN PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI</p>	Bimbingan Teknis Rumah Layak Huni (RLH) dan Rumah Tapak Hijau (RTH) di Wilayah III pada hari Rabu, tanggal 30 Juli 2025
54.	 <p>BALAI PELAKSANAAN PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI</p>	Kunjungan Direktorat Kasubdit RUSUN, pada hari Rabu, tanggal 30 Juli 2025

**LAMPIRAN FOTO KEGIATAN BP3KP SULAWESI III
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	FOTO	NAMA KEGIATAN
55.	 <p>BALAI PELAKSANAAN PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI</p>	Sinkronisasi Penyelenggaraan Program Perumahan pada hari Senin, tanggal 04 Agustus 2025
56.	 <p>BALAI PELAKSANAAN PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI</p>	Sinkronisasi Penyelenggaraan Program Perumahan, tahun 2025 Provinsi Sulawesi Tenggara pada hari Selasa, tanggal 05 Agustus 2025
57.	 <p>BALAI PELAKSANAAN PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI</p>	Kunjungan kerja dinas PKP Kab. Sinjai, pada hari Selasa, tanggal 05 Agustus 2025

**LAMPIRAN FOTO KEGIATAN BP3KP SULAWESI III
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	FOTO	NAMA KEGIATAN
58.		Audience dengan para pendemo pada hari Kamis, tanggal 07 Agustus 2025
59.		Rapat Managemen Risiko pada hari Kamis, tanggal 07 Agustus 2025
60.		Koordinasi Dinas Barru, pada hari Jum'at, tanggal 08 Agustus 2025

**LAMPIRAN FOTO KEGIATAN BP3KP SULAWESI III
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	FOTO	NAMA KEGIATAN
61.	 <p>BALAI PELAKSANAAN PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI</p>	Koordinasi Dinas Bau Bau pada hari Jum'at, tanggal 08 Agustus 2025
62.	 <p>BALAI PELAKSANAAN PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI</p>	Koordinasi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Fraksi Gerindra pada hari Jum'at, tanggal 08 Agustus 2025
63.	 <p>BALAI PELAKSANAAN PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI</p>	Kunjungan ibu SESDITJEN TKPR ke kantor BP3KP Sulawesi 3, pada hari Selasa, tanggal 12 Agustus 2025

**LAMPIRAN FOTO KEGIATAN BP3KP SULAWESI III
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	FOTO	NAMA KEGIATAN
64.		<p>Managemen Risiko pendampingan BPKP Pusat pada hari Kamis, tanggal 14 Agustus 2025</p>
65.		<p>Rapat Sinkronisasi Penyelenggaraan program Perumahan Prov Sulsel TA 2025 pada hari Kamis, tanggal 21 Agustus 2025</p>
66.		<p>Rapat Sinkronisasi Penyelenggaraan program Perumahan Prov Sulsel TA 2025 pada hari Kamis, tanggal 21 Agustus 2025</p>




**LAMPIRAN FOTO KEGIATAN BP3KP SULAWESI III
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	FOTO	NAMA KEGIATAN
67.	 <p>BALAI PELAKSANAAN PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI</p>	Pendampingan Direktur Pembangunan Perkotaan di Palopo Bulan September 2025
68.	 <p>BALAI PELAKSANAAN PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI</p>	Pendampingan Direktur Pembangunan Perkotaan di Palopo Bulan September 2025
69.	 <p>BALAI PELAKSANAAN PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI</p>	Pendampingan Direktur Pembangunan Perkotaan di Palopo Bulan September 2025

**LAMPIRAN FOTO KEGIATAN BP3KP SULAWESI III
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	FOTO	NAMA KEGIATAN
70.	 <p>BALAI PELAKSANAAN PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI</p>	<p>Rapat sosialisasi ZI dilingkungan BP3KP Sulawesi III pada hari Kamis, tanggal 16 Oktober 2025</p>
71.	 <p>BALAI PELAKSANAAN PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI</p>	<p>Bincang Integritas Bersama Komisi V DPR RI Bapak Yusuf Hamka pada hari Jum'at, tanggal 17 Oktober 2025</p>
72.	 <p>BALAI PELAKSANAAN PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI</p>	<p>Car Free Day (CFD) Kendari tim Klinik PKP pada hari Ahad, tanggal 19 Oktober 2025</p>

**LAMPIRAN FOTO KEGIATAN BP3KP SULAWESI III
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	FOTO	NAMA KEGIATAN
73.	 <p>BALAI PELAKSANAAN PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI</p>	Upacara hari Sumpah Pemuda pada hari Selasa, tanggal 28 Oktober 2025
74.	 <p>BALAI PELAKSANAAN PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI</p>	Pelatihan Pelayanan Publik Berintegritas dan Pencanangan Zona Integritas pada hari Jum'at, tanggal 31 Oktober 2025
75.	 <p>BALAI PELAKSANAAN PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI</p>	Pelatihan Pelayanan Publik Berintegritas dan Pencanangan Zona Integritas pada hari Jum'at, tanggal 31 Oktober 2025

**LAMPIRAN FOTO KEGIATAN BP3KP SULAWESI III
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	FOTO	NAMA KEGIATAN
76.	 <p>BALAI PELAKSANAAN PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI</p>	<p>Pemantauan dan Verifikasi Itjen PKP pada hari Senin, tanggal 03 November 2025</p>
77.	 <p>BALAI PELAKSANAAN PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI</p>	<p>Hari Kedua ITJEN PKP, Pemantauan dan Verifikasi Dokumen pada hari Selasa, tanggal 04 November 2025</p>
78.	 <p>BALAI PELAKSANAAN PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI</p>	<p>Hari Ketiga ITJEN PKP, Pemantauan dan Verifikasi Dokumen pada hari Rabu, tanggal 05 November 2025</p>

**LAMPIRAN FOTO KEGIATAN BP3KP SULAWESI III
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	FOTO	NAMA KEGIATAN
79.	 <p>BALAI PELAKSANAAN PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI</p>	<p>Arahan Pak Ses Itjen Kemen PKP Kepada Pegawai BP3KP Sulawesi III pada hari Rabu, tanggal 05 November 2025</p>
80.	 <p>BALAI PELAKSANAAN PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI</p>	<p>Penandatanganan Kontrak Peningkatan Kualitas Kumuh pada hari Rabu, tanggal 05 November 2025</p>
81.	 <p>BALAI PELAKSANAAN PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI</p>	<p>Percepatan Perizinan Dalam Rangka Mendukung Penyediaan Perumahan diwilayah Perkotaan pada hari Kamis, tanggal 06 November 2025</p>

**LAMPIRAN FOTO KEGIATAN BP3KP SULAWESI III
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	FOTO	NAMA KEGIATAN
82.	 <p style="text-align: right;"></p> <p style="text-align: center; font-size: small;">BALAI PELAKSANAAN PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI</p>	<p>Ekspos Pengusulan Rusun Kejati Sulawesi Selatan pada hari Jum'at, tanggal 07 November 2025</p>
83.	 <p style="text-align: right;"></p> <p style="text-align: center; font-size: small;">BALAI PELAKSANAAN PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI</p>	<p>Rapat pokja MR dan ZI dalam rangka panduan pengisian LKE (Lembar Kerja Evaluasi) pada hari Jum'at, tanggal 07 November 2025</p>
84.	 <p style="text-align: right;"></p> <p style="text-align: center; font-size: small;">BALAI PELAKSANAAN PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI</p>	<p>Upacara Bendera memperingati Hari Pahlawan pada hari Senin, tanggal 10 November 2025</p>

**LAMPIRAN FOTO KEGIATAN BP3KP SULAWESI III
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	FOTO	NAMA KEGIATAN
85.	 <p>BALAI PELAKSANAAN PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI</p>	<p>Bimtek Pengusulan Bantuan pada hari Rabu, tanggal 19-20 November 2025</p>
86.	 <p>BALAI PELAKSANAAN PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI</p>	<p>Seminar Engineering BP3KP UINAM pada hari Jum'at, tanggal 21 November 2025</p>
87.	 <p>BALAI PELAKSANAAN PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI</p>	<p>Car Free Day (CFD) Kendari Klinik PKP pada hari Ahad, tanggal 23 November 2025</p>

**LAMPIRAN FOTO KEGIATAN BP3KP SULAWESI III
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	FOTO	NAMA KEGIATAN
88.		<p>Bimtek Verifikasi Hasil Penilaian Lokasi Perumahan Kumuh pada hari Kamis, tanggal 27 November 2025</p>
89.		<p>SEMINAR WORK LIFE BALANCE pada hari Jum'at, tanggal 28 November 2025</p>
90.		<p>Rapat Koordinasi dan Monitoring Pelaksanaan BPS perkotaan, Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara TA 2025 hari Jum'at, tanggal 28 November 2025</p>

**LAMPIRAN FOTO KEGIATAN BP3KP SULAWESI III
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	FOTO	NAMA KEGIATAN
91.		Rapat Kerja Pokja PKP Balai P3KP Sul III pada bulan November 2025
92.		Perpisahan Kerja Praktek Mahasiswa UINAM pada bulan Desember 2025
93.		Monitoring dan Evaluasi BPS S serta Sosialisasi Layanan Kklinik PKP di Kabupaten Barru pada hari Rabu, tanggal 05-06 Desember 2025

**LAMPIRAN FOTO KEGIATAN BP3KP SULAWESI III
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	FOTO	NAMA KEGIATAN
94.	 <p>BALAI PELAKSANAAN PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI</p>	Kunjungan BPK ke BPS, Kabupaten Gowa, Kecamatan Somba opu pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2025
95.	 <p>BALAI PELAKSANAAN PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI</p>	Kunjungan BPK ke Rusun Kejari Palopo pada hari Selasa, tanggal 16 Desember 2025
96.	 <p>BALAI PELAKSANAAN PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI</p>	Kunjungan Dinas Perkimtan Pare Pare pada hari Senin, tanggal 22 Desember 2025

**LAMPIRAN FOTO KEGIATAN BP3KP SULAWESI III
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	FOTO	NAMA KEGIATAN
97.	 <p>BALAI PELAKSANAAN PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI</p>	<p>Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI pada hari Ahad, tanggal 14 Desember 2025</p>
98.	 <p>BALAI PELAKSANAAN PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI</p>	<p>Kunjungan BPK ke Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi III pada hari Senin, tanggal 15 Desember 2025</p>
99.	 <p>BALAI PELAKSANAAN PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI</p>	<p>Pemaparan Kegiatan BP3KP Sulawesi III di Kejaksaan Tinggi Sulawesi III pada hari Rabu, tanggal 10 Desember 2025</p>

**LAMPIRAN FOTO KEGIATAN BP3KP SULAWESI III
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	FOTO	NAMA KEGIATAN
100.		<p>Ucapan Terima Kasih ke Pak Prabowo Bantuan BPS Kabupaten Soppeng pada bulan Desember 2025</p>
101.		<p>Pembinaan Pegawai PPK Formasi Tahun 2024 dan Penandatanganan Pakta Integritas pada hari Selasa, tanggal 09 Desember 2025</p>
102.		<p>Peninjauan korban angin puting beliung, Kabupaten Barru Sulawesi Selatan, Desa Pancana pada hari Senin, tanggal 22 Desember 2025</p>

**LAMPIRAN FOTO KEGIATAN BP3KP SULAWESI III
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	FOTO	NAMA KEGIATAN
103.	 <p>BALAI PELAKSANAAN PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI</p>	<p>Peninjauan Progres Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh Wiringtappareng, Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan pada tanggal 22 Desember 2025</p>
104.	 <p>BALAI PELAKSANAAN PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI</p>	<p>Rapat dengan BPK pada hari Jum'at, tanggal 19 Desember 2025</p>
105.	 <p>BALAI PELAKSANAAN PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI</p>	<p>Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Peningkatan Kapasitas SDM – MALINO pada hari Senin, tanggal 17-19 Desember 2025</p>

**LAMPIRAN FOTO KEGIATAN BP3KP SULAWESI III
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	FOTO	NAMA KEGIATAN
106.	 <p style="text-align: right;"></p> <p style="text-align: center; font-size: small;">BALAI PELAKSANAAN PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI</p>	<p>Bimbingan Teknis Tata Cara Verifikasi Permukiman Kumuh dan Perumahan Kumuh di Zatar Coffee pada hari Senin tanggal 15 Desember 2025</p>
107.	 <p style="text-align: right;"></p> <p style="text-align: center; font-size: small;">BALAI PELAKSANAAN PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI</p>	<p>Rapat Koordinasi Evaluasi dan Sinkronisasi Rencana Kerja, BAPPELITBANGDA Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada hari Rabu, tanggal 10 Desember 2025</p>
108.	 <p style="text-align: right;"></p> <p style="text-align: center; font-size: small;">BALAI PELAKSANAAN PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI</p>	<p>Upacara Memperingati Hari Bela Negara Ke 77 pada hari Jum'at, tanggal 19 Desember 2025</p>

**LAMPIRAN FOTO KEGIATAN BP3KP SULAWESI III
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	FOTO	NAMA KEGIATAN
109.		<p>Rapat Koordinasi Realisasi Penyaluran FLPP TA 2025 Provinsi Sul-Sel dan Provinsi Sul-Sel pada bulan Desember 2025</p>
110.		<p>Mekanisme Perpanjangan RPATA di Akhir Tahun Anggaran pada hari Selasa, tanggal 30 Desember 2025</p>
111.		<p>Rapat Evaluasi BPS Tahun 2025 pada hari Selasa, tanggal 30 Desember 2025</p>

**LAMPIRAN FOTO KEGIATAN BP3KP SULAWESI III
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	FOTO	NAMA KEGIATAN
112.	 <p>BALAI PELAKSANAAN PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI</p>	<p>Rapat Koordinasi, Percepatan progres dan evaluasi kinerja coordinator kabupaten dan tfl pelaksanaan kegiatan BSPS Tahun anggaran 2025 pada bulan Desember 2025</p>
113.	 <p>BALAI PELAKSANAAN PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI</p>	<p>Rapat Koordinasi, Percepatan progres dan evaluasi kinerja coordinator kabupaten dan tfl pelaksanaan kegiatan BSPS Tahun anggaran 2025 pada bulan Desember 2025</p>
114.	 <p>BALAI PELAKSANAAN PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI</p>	<p>Rapat Bulanan Tim Kompu pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2025</p>